

**FOREIGN DIRECT INVESTMENT TIONGKOK DI INDONESIA DAN
PAKISTAN SEBAGAI INSTRUMEN HEGEMONI
SKRIPSI**



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

MUHAMMAD NOVAL DZIKRULLAH

21323227

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2026

**FOREIGN DIRECT INVESTMENT TIONGKOK DI INDONESIA DAN
PAKISTAN SEBAGAI INSTRUMEN HEGEMONI
SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

MUHAMMAD NOVAL DZIKRULLAH

21323227

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

FOREIGN DIRECT INVESTMENT TIONGKOK DI INDONESIA DAN PAKISTAN SEBAGAI INSTRUMEN HEGEMONI

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia



Ketua Program Studi

Karina
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A.
- 2 Farhan Abdul Majiid, S.Sos., M.A.
- 3 Rizki Dian Nursita, S.IP., M.H.I.

Tanda Tangan

Hangga Fathana
Farhan Abdul Majiid
Rizki Dian Nursita

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 21 Mei 2026



Muhammad Noval Dzikrullah

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	1
HALAMAN PENGESAHAN.....	3
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	4
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR TABEL.....	7
DAFTAR GAMBAR.....	8
ABSTRAK.....	9
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Cakupan penelitian.....	8
1.5 Tinjauan Pustaka.....	9
1.6 Kerangka Pemikiran.....	13
1.7 Argumen Sementara.....	18
1.8 Metode Penelitian.....	18
1.8.1 Jenis Penelitian.....	18
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	19
1.8.3 Metode Pengumpulan Data.....	19
1.8.4 Proses Penelitian.....	19
1.9 Sistematika Pembahasan.....	19
BAB 2 FOREIGN DIRECT INVESTMENT TIONGKOK DI INDONESIA DAN PAKISTAN SEBAGAI INSTRUMEN HEGEMONI.....	21
2.1.1 Definisi dan Konsep FDI.....	23
2.1.2 Peran FDI dalam Perekonomian Global.....	24
2.1.3 FDI sebagai Mekanisme Pembentuk Pengaruh, Keterhubungan, dan Ketergantungan.....	26
2.2 BRI sebagai Kerangka Ekspansi Ekonomi Tiongkok.....	28
2.2.1 Latar Belakang dan Konsep BRI.....	28
2.2.2 Pola dan Sektor Strategis Investasi BRI.....	31
2.3 Studi Kasus Investasi Tiongkok di Indonesia dan Pakistan: Integrasi Produksi dan Konektivitas Ekonomi.....	33
2.3.1 Studi Kasus di Indonesia: Integrasi Produksi dan Konektivitas..	34
2.3.2 Studi Kasus di Pakistan: Sektor Energi dan Konektivitas Logistik..	38
2.4 FDI sebagai Instrumen Pembentuk Ketergantungan Struktural dan Relasi Kekuasaan Asimetris.....	43
2.4.1 Ketergantungan Struktural melalui Integrasi Vertikal dan	

<i>Ekosistem Industri</i>	43
2.4.2 <i>Ketergantungan Finansial melalui Transformasi Risiko dan Keterikatan Fiskal</i>	47
2.4.3 <i>Ketergantungan Teknis melalui Standardisasi Teknologi dan Model Operasional</i>	51
BAB 3 ANALISIS FUNGSI FDI TIONGKOK DI INDONESIA DAN PAKISTAN: PERSPEKTIF HST	56
3.1. FDI Tiongkok dalam Spektrum Hegemonic Leadership: Penyediaan Kapasitas Ekonomi dan Konektivitas Struktural.....	58
3.1.1 <i>Primary Aim</i>	58
3.1.2 <i>Method</i>	60
3.1.3 <i>Outcome</i>	63
3.2 FDI Tiongkok dalam Spektrum Hegemonic Dominance: Mekanisme Kontrol Struktural dan Lock-in Effect Ekonomi.....	66
3.2.1 <i>Primary Aim</i>	67
3.2.2 <i>Method</i>	70
3.2.3 <i>Outcome</i>	74
3.3 Sintesis: Pergeseran dari Hegemonic Leadership menuju Hegemonic Dominance.....	77
BAB 4 PENUTUP	83
4.1 Kesimpulan.....	83
4.2 Rekomendasi.....	87
DAFTAR PUSTAKA	88

DAFTAR TABEL

TABEL 3.1 Aplikasi Kerangka Pemikiran HST pada FDI Tiongkok di Indonesia.....	79
TABEL 3.2 Aplikasi Kerangka Pemikiran HST pada FDI Tiongkok di Pakistan.....	80

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1 Peta BRI Tiongkok.....	29
-----------------------------------	----

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis fungsi *Foreign Direct Investment* (FDI) Tiongkok di Indonesia dan Pakistan dalam membentuk pola pengaruh hegemoni melalui kerangka *Belt and Road Initiative* (BRI). Masalah utama yang diangkat adalah bagaimana integrasi investasi dan konektivitas ekonomi memperkuat posisi struktural Tiongkok terhadap negara penerima. Dengan menggunakan kerangka *Hegemonic Stability Theory* (HST) dari Charles P. Kindleberger, penelitian ini membedah dinamika tersebut dalam spektrum *leadership* dan *dominance*. Argumen sementara menyatakan bahwa FDI Tiongkok mengalami pergeseran fungsi dari penyediaan public goods untuk mengatasi *bottleneck* pembangunan menuju pembentukan keterikatan struktural yang asimetris. Temuan penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia, pergeseran terjadi melalui integrasi vertikal industri nikel dan transformasi risiko fiskal pada proyek infrastruktur. Sementara di Pakistan, dominasi terinstitusionalisasi melalui skema energi dan logistik CPEC. Akumulasi mekanisme ini menciptakan stabilitas hierarkis yang mempersempit ruang kebijakan domestik dan mengunci negara penerima ke dalam ekosistem teknologi serta pembiayaan Tiongkok. Secara keseluruhan, integrasi ekonomi yang dibangun melalui FDI mereproduksi distribusi kekuasaan yang asimetris dalam jaringan ekonomi global.

Kata-kata kunci: *Foreign Direct Investment* (FDI), Tiongkok, *Hegemonic Stability Theory*, *Belt and Road Initiative*, Indonesia, Pakistan.

ABSTRACT

This research analyzes the function of Chinese Foreign Direct Investment (FDI) in Indonesia and Pakistan in shaping hegemonic influence patterns within the Belt and Road Initiative (BRI) framework. The core issue discusses how investment integration and economic connectivity strengthen China's structural position toward recipient nations. Utilizing the Hegemonic Stability Theory (HST) by Charles P. Kindleberger, the study examines these dynamics within the spectrum of leadership and dominance. The provisional argument suggests that Chinese FDI undergoes a functional shift from providing public goods to overcome development bottlenecks toward the formation of asymmetric structural attachments. Research findings reveal that in Indonesia, this shift occurs through vertical integration of the nickel industry and fiscal risk transformation in infrastructure projects. In Pakistan, dominance is institutionalized through CPEC's energy and logistics schemes. The accumulation of these mechanisms creates a hierarchical stability that narrows domestic policy space and locks recipient states into Chinese technological and financing ecosystems. Overall, the economic integration built through FDI reproduces an asymmetric distribution of power within the global economic network.

Keywords: Foreign Direct Investment (FDI), China, Hegemonic Stability Theory, Belt and Road Initiative, Indonesia, Pakistan.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam beberapa dekade terakhir, sistem ekonomi global mengalami transformasi yang ditandai oleh pergeseran pusat gravitasi kekuatan ekonomi dari negara-negara Barat menuju Asia. Perubahan tersebut terlihat dari meningkatnya kontribusi negara-negara Asia terhadap perdagangan internasional, produksi industri, serta arus investasi global (Pangestu 2018). Dalam konteks ini, Tiongkok berkembang menjadi salah satu aktor paling dominan melalui pertumbuhan ekonomi yang pesat, kapasitas industri yang besar, serta kemampuan finansial yang terus meningkat. Perkembangan tersebut mendorong transformasi strategi Tiongkok dari yang semula berorientasi pada pembangunan domestik menjadi strategi ekspansi eksternal yang bertujuan memperkuat posisi negara tersebut dalam struktur ekonomi internasional. Dengan demikian, ekspansi ekonomi Tiongkok tidak hanya merepresentasikan peningkatan aktivitas ekonomi semata, tetapi juga mencerminkan upaya memperluas pengaruh dan memperkuat posisi strukturalnya dalam sistem ekonomi global yang semakin kompetitif (Ikenberry 2018).

Transformasi tersebut tecermin melalui keterlibatan Tiongkok yang semakin aktif dalam perdagangan internasional, pembangunan infrastruktur, serta investasi di berbagai negara berkembang (Rolland 2017). Dalam perkembangannya, keterlibatan tersebut tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik, tetapi juga untuk membangun

jaringan konektivitas ekonomi yang mampu mendukung keberlanjutan produksi, distribusi, dan rantai pasok strategis Tiongkok dalam jangka panjang. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi internasional Tiongkok semakin terintegrasi dengan kepentingan strategis negara tersebut dalam mempertahankan stabilitas industri dan posisinya di dalam rantai produksi global. Oleh karena itu, ekspansi ekonomi Tiongkok perlu dipahami tidak hanya sebagai aktivitas ekonomi biasa, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika kekuatan dalam ekonomi-politik internasional (Jones dan Hameiri 2021).

Salah satu instrumen utama yang digunakan Tiongkok dalam proses tersebut adalah *Foreign Direct Investment* (FDI). Dalam pemahaman konvensional, FDI umumnya dipahami sebagai aliran modal yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, memperkuat kapasitas produksi, serta mendorong transfer teknologi di negara penerima (OECD 2008). Kehadiran investasi asing sering diposisikan sebagai faktor penting dalam proses pembangunan ekonomi, terutama bagi negara berkembang yang menghadapi keterbatasan pembiayaan dan kapasitas infrastruktur (UNCTAD 2025). Namun demikian, dalam perkembangan ekonomi-politik global kontemporer, FDI tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai mekanisme ekonomi yang bersifat teknis dan netral, tetapi juga dapat berfungsi sebagai instrumen strategis yang memungkinkan negara investor membangun keterhubungan ekonomi jangka panjang melalui integrasi pembiayaan, infrastruktur, produksi, dan teknologi (Kostecka-Tomaszewska dan Krukowska 2021).

Dalam konteks tersebut, FDI menjadi bagian dari strategi yang memungkinkan negara investor memperluas pengaruh ekonominya terhadap negara penerima. Melalui investasi pada sektor-sektor strategis, negara investor tidak hanya memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga dapat membangun keterikatan ekonomi yang memperkuat posisinya dalam jaringan produksi dan distribusi internasional. Dengan demikian, FDI tidak hanya berkaitan dengan perpindahan modal, tetapi juga berkaitan dengan pembentukan hubungan ekonomi yang semakin terintegrasi dan saling bergantung. Kondisi ini menunjukkan bahwa investasi asing memiliki dimensi ekonomi sekaligus dimensi struktural dalam membentuk relasi antarnegara.

Pendekatan tersebut terinstitusionalisasi secara lebih sistematis melalui *Belt and Road Initiative* (BRI) yang diluncurkan Tiongkok pada tahun 2013. Melalui BRI, Tiongkok memperluas investasi pada sektor infrastruktur transportasi, energi, pelabuhan, serta kawasan industri di berbagai negara berkembang (Rolland 2017). Secara umum, BRI dinarasikan sebagai kerangka pembangunan konektivitas global yang bertujuan memperkuat kerja sama ekonomi, meningkatkan integrasi perdagangan, dan membantu negara berkembang mengatasi kesenjangan pembiayaan infrastruktur. Dalam praktiknya, BRI menjadi salah satu instrumen utama bagi Tiongkok untuk memperluas jaringan konektivitas ekonomi lintas negara yang terhubung dengan kepentingan ekonomi dan industri domestiknya (Jones dan Zeng 2019; NDRC 2015).

Pada tahap awal, keterlibatan Tiongkok melalui FDI dan BRI banyak dipahami sebagai bentuk penyediaan *public goods* yang membantu negara

berkembang dalam mengatasi berbagai *bottleneck* struktural dalam pembangunan ekonomi (Öztürk 2019). Banyak negara berkembang menghadapi keterbatasan pembiayaan pembangunan, rendahnya kualitas infrastruktur, serta lemahnya konektivitas ekonomi yang menghambat integrasi mereka ke dalam sistem ekonomi global. Kondisi tersebut semakin diperkuat oleh keberadaan *global infrastructure financing gap*, yaitu kesenjangan antara kebutuhan pembangunan infrastruktur dan kapasitas pembiayaan yang tersedia secara global, terutama di negara-negara berkembang (ADB 2017). Fenomena ini kemudian menciptakan ruang yang signifikan bagi ekspansi pembiayaan infrastruktur Tiongkok melalui inisiatif BRI sebagai penyedia alternatif modal eksternal (Hillman 2020). Dalam situasi tersebut, investasi Tiongkok dipandang mampu menyediakan alternatif pembiayaan pembangunan yang mempercepat pembangunan pelabuhan, jalan raya, jalur kereta api, pembangkit listrik, serta kawasan industri yang dapat meningkatkan kapasitas produksi serta membuka peluang integrasi ekonomi yang lebih luas bagi negara penerima (Brautigam 2020).

Dalam kerangka *Hegemonic Stability Theory* (HST), kondisi tersebut mencerminkan karakter *hegemonic leadership*, yaitu ketika aktor hegemon mendukung stabilitas sistemik melalui penyediaan fondasi material dan *public goods* yang mendukung keberlangsungan sistem ekonomi internasional (Kindleberger 1981). Dalam konteks ini, FDI Tiongkok dipahami sebagai instrumen yang membantu memperkuat konektivitas ekonomi global dan mendorong pembangunan di negara berkembang. Kehadiran investasi tersebut pada awalnya dipandang mampu menciptakan manfaat kolektif melalui

peningkatan kapasitas ekonomi dan pembangunan infrastruktur strategis (Brautigam 2020).

Namun demikian, seiring meningkatnya intensitas dan pendalaman integrasi investasi pada sektor-sektor strategis, muncul dinamika yang menunjukkan bahwa keterhubungan ekonomi tersebut tidak sepenuhnya berlangsung dalam konfigurasi yang simetris. Dalam perkembangannya, integrasi pembiayaan, produksi, dan teknologi secara bertahap memperlihatkan kecenderungan pembentukan keterikatan struktural yang semakin memperkuat posisi investor dalam jaringan ekonomi negara penerima (Giroud 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa investasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembangunan, tetapi juga dapat menjadi mekanisme pembentukan pengaruh struktural yang mempengaruhi fleksibilitas ekonomi negara penerima dalam jangka panjang (Ali et al. 2025).

Fenomena tersebut dapat diamati melalui kasus Indonesia dan Pakistan yang dipilih sebagai fokus penelitian ini karena keduanya merupakan salah satu penerima utama investasi Tiongkok dalam kerangka BRI, namun menunjukkan karakteristik investasi yang berbeda. Indonesia dan Pakistan merepresentasikan dua pola implementasi FDI Tiongkok yang berbeda dalam mendukung pembangunan ekonomi negara penerima. Indonesia merepresentasikan pola investasi yang berorientasi pada hilirisasi industri, pembangunan kawasan industri, serta penguatan rantai pasok manufaktur berbasis sumber daya alam. Dalam konteks tersebut, investasi Tiongkok di Indonesia terkonsentrasi pada sektor hilirisasi industri dan pembangunan infrastruktur transportasi yang

berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas produksi serta integrasi industri nasional ke dalam *Global Value Chains* (GVC). Investasi tersebut juga mendorong percepatan industrialisasi berbasis sumber daya alam dan memperkuat keterlibatan Indonesia dalam jaringan produksi industri yang lebih luas (Tritto 2023; Wijaya dan Jones 2025).

Sementara itu, Pakistan merepresentasikan pola investasi yang lebih berorientasi pada pembangunan koridor ekonomi, infrastruktur energi, dan konektivitas strategis melalui *China-Pakistan Economic Corridor* (CPEC). Pakistan dipilih karena menjadi salah satu proyek paling strategis dalam implementasi BRI, dimana investasi Tiongkok difokuskan pada pembangunan koridor ekonomi, infrastruktur energi, dan konektivitas logistik yang dipandang penting dalam meningkatkan kapasitas energi serta memperkuat konektivitas ekonomi Pakistan. Perbedaan karakteristik investasi tersebut menunjukkan bahwa implementasi FDI Tiongkok tidak berlangsung dalam bentuk yang sepenuhnya seragam, melainkan menyesuaikan kebutuhan pembangunan dan struktur ekonomi masing-masing negara penerima (Kanwal et al. 2020; Jones dan Hameiri 2020).

Perbedaan karakteristik investasi tersebut menjadi alasan utama pemilihan Indonesia dan Pakistan sebagai studi kasus dalam penelitian ini. Meskipun memiliki fokus sektoral yang berbeda, investasi Tiongkok di kedua negara sama-sama ditujukan untuk mengatasi hambatan pembangunan melalui penyediaan modal, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan konektivitas ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini tidak berfokus pada identifikasi perbedaan antara Indonesia dan Pakistan, melainkan pada pemahaman mengenai

kecenderungan yang serupa dari hasil implementasi FDI Tiongkok di kedua negara. Dengan kata lain, perbedaan sektor dan bentuk investasi digunakan untuk melihat apakah keterhubungan ekonomi yang semakin erat dengan Tiongkok juga muncul dalam konteks pembangunan yang berbeda. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa integrasi ekonomi yang dibangun melalui investasi, infrastruktur, dan konektivitas berkontribusi terhadap semakin eratnya hubungan ekonomi antara negara penerima dan Tiongkok (Jones dan Hameiri 2021; Horn et al. 2021; Giroud 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana hasil FDI Tiongkok di Indonesia dan Pakistan serta implikasinya terhadap hubungan ekonomi antara Tiongkok dan negara penerima. Penelitian ini menekankan pentingnya memahami bagaimana investasi, pembangunan infrastruktur, dan konektivitas ekonomi membentuk keterhubungan ekonomi yang semakin mendalam antara Tiongkok dan negara penerima dalam kerangka BRI.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana kesamaan hasil implementasi FDI Tiongkok di Indonesia dan Pakistan dalam membentuk hubungan ekonomi antara negara penerima dan Tiongkok?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis perkembangan dan pola FDI Tiongkok di Indonesia dan Pakistan, khususnya dalam sektor-sektor strategis seperti infrastruktur,

transportasi, energi, dan kawasan industri yang menjadi fokus utama ekspansi investasi BRI luar negeri Tiongkok.

2. Menganalisis fungsi FDI Tiongkok sebagai instrumen pembentukan pengaruh hegemoni ekonomi melalui pembangunan konektivitas, integrasi produksi, dan keterhubungan ekonomi antara Tiongkok dengan negara penerima investasi.
3. Menjelaskan bagaimana implementasi FDI Tiongkok di Indonesia dan Pakistan membentuk keterhubungan ekonomi melalui integrasi produksi, pengamanan sumber daya strategis, konektivitas logistik, serta mekanisme pembiayaan dan teknologi dalam kerangka BRI.

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis fungsi FDI Tiongkok dalam membentuk pola pengaruh hegemoni ekonomi terhadap Indonesia dan Pakistan dalam kerangka HST. Cakupan penelitian dibatasi pada periode 2013 hingga 2025 sejak peluncuran BRI, dengan studi kasus di Indonesia dan Pakistan sebagai dua negara penerima investasi Tiongkok yang menunjukkan karakteristik implementasi investasi yang berbeda. Analisis difokuskan pada sektor-sektor strategis yang mencakup infrastruktur konektivitas, energi, hilirisasi industri, serta kawasan industri yang berperan dalam memperkuat integrasi ekonomi dengan jaringan produksi dan distribusi Tiongkok. Batasan analisis mencakup aspek ekonomi dan struktural dalam pembentukan keterhubungan ekonomi, integrasi produksi, dan relasi ekonomi yang semakin terintegrasi, tanpa membahas secara mendalam aspek politik domestik maupun keamanan. Dengan demikian,

penelitian ini menekankan bagaimana implementasi FDI Tiongkok berfungsi dalam membentuk pola pengaruh hegemoni melalui keterikatan struktural dan integrasi ekonomi antara Tiongkok dengan negara penerima investasi.

1.5 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini dilakukan untuk memperkaya analisis dengan membandingkan penelitian terdahulu yang mengangkat topik serupa mengenai FDI Tiongkok dan BRI. Oleh karena itu, penulis meninjau beberapa jurnal akademik terbaru yang relevan guna mengidentifikasi posisi dan kontribusi penelitian ini.

Sumber pertama adalah artikel Lin et al. (2025) yang berjudul *“Impact of the Belt and Road Initiative on China’s Inward and Outward FDI and Investment Coordination Synergy.”* Penelitian ini membahas bagaimana BRI berperan dalam meningkatkan arus FDI Tiongkok serta memperkuat koordinasi investasi dan integrasi ekonomi lintas negara. Artikel tersebut menekankan bahwa BRI berfungsi sebagai instrumen yang mendukung konektivitas ekonomi global melalui penguatan jaringan investasi, produksi, dan perdagangan internasional. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ekspansi investasi Tiongkok berkontribusi terhadap peningkatan keterhubungan ekonomi dan koordinasi investasi global (Lin et al. 2025). Namun, penelitian ini masih berfokus pada dimensi ekonomi makro dan sinergi investasi, sehingga belum membahas bagaimana implementasi FDI Tiongkok dapat membentuk pola pengaruh hegemoni ekonomi terhadap negara penerima melalui keterhubungan struktural dan relasi ekonomi yang terbentuk dalam proses integrasi tersebut.

Berbeda dengan penelitian tersebut, fokus penulis adalah menganalisis fungsi FDI Tiongkok dalam memperkuat integrasi dan konektivitas ekonomi, tetapi juga berupaya menjelaskan bagaimana implementasi investasi tersebut berfungsi dalam membentuk pola pengaruh hegemoni terhadap negara penerima. Dengan menggunakan kerangka HST, penelitian ini menganalisis bagaimana FDI Tiongkok di Indonesia dan Pakistan membangun keterhubungan ekonomi, integrasi produksi, serta posisi struktural yang memperkuat pengaruh Tiongkok dalam jaringan ekonomi internasional.

Sumber kedua adalah artikel oleh Li et al. (2022) yang berjudul *“Foreign Direct Investment along the Belt and Road: A Political Economy Perspective.”* Penelitian ini membahas FDI Tiongkok dalam kerangka BRI melalui perspektif ekonomi politik internasional. Artikel tersebut menjelaskan bahwa ekspansi FDI Tiongkok tidak hanya didorong oleh kepentingan ekonomi perusahaan, tetapi juga berkaitan dengan strategi negara dalam memperluas konektivitas ekonomi, mengamankan rantai pasok strategis, serta memperkuat posisi Tiongkok dalam sistem ekonomi global. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi FDI dalam kerangka BRI memiliki keterkaitan erat dengan kepentingan geopolitik, koordinasi negara, dan pembangunan jaringan ekonomi lintas kawasan (Li et al. 2022)

Meskipun demikian, artikel tersebut masih berfokus pada dimensi strategi ekonomi politik dan motif ekspansi investasi Tiongkok secara umum, sehingga belum secara spesifik menjelaskan bagaimana implementasi FDI tersebut membentuk pola pengaruh hegemoni terhadap negara penerima investasi. Artikel

tersebut juga belum menganalisis bagaimana integrasi investasi, pembangunan konektivitas, dan keterhubungan produksi dapat menghasilkan penguatan posisi struktural Tiongkok dalam relasi ekonomi dengan negara penerima. Selain itu, artikel tersebut belum menggunakan kerangka HST untuk menjelaskan hubungan antara ekspansi FDI dan pembentukan pola pengaruh hegemoni ekonomi.

Kemudian, sumber yang terakhir adalah artikel oleh Jenkins dan Lombardozzi (2024) yang berjudul *“The Belt and Road Initiative and Dynamics of Structural Transformation.”* Penelitian ini membahas bagaimana BRI berkontribusi terhadap proses transformasi struktural di negara-negara penerima melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan konektivitas ekonomi, serta integrasi produksi dan perdagangan internasional. Artikel tersebut menjelaskan bahwa investasi Tiongkok dalam kerangka BRI tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempengaruhi perubahan struktur ekonomi negara penerima melalui penguatan kapasitas industri, perluasan jaringan logistik, dan integrasi ke dalam rantai pasok global. Penelitian ini menunjukkan bahwa BRI memiliki peran penting dalam membentuk dinamika pembangunan ekonomi jangka panjang melalui keterhubungan ekonomi lintas negara (Jenkins dan Lombardozzi 2024).

Meskipun demikian, artikel tersebut masih berfokus pada dimensi transformasi struktural dan pembangunan ekonomi, sehingga belum secara spesifik menjelaskan bagaimana implementasi FDI Tiongkok dapat membentuk pola pengaruh hegemoni terhadap negara penerima melalui keterhubungan struktural dan integrasi ekonomi yang dihasilkan. Selain itu, artikel tersebut

belum menganalisis bagaimana pembangunan konektivitas dan integrasi produksi dapat memperkuat posisi struktural Tiongkok dalam relasi ekonomi internasional, khususnya dalam hubungan antara negara investor dan negara penerima investasi.

Berbeda dengan artikel tersebut, dalam penelitian ini penulis tidak hanya menganalisis transformasi struktural yang dihasilkan oleh implementasi FDI Tiongkok, tetapi juga berupaya menjelaskan bagaimana FDI Tiongkok di Indonesia dan Pakistan berfungsi dalam membentuk pola pengaruh hegemoni melalui keterhubungan ekonomi, integrasi produksi, dan penguatan posisi struktural Tiongkok dalam jaringan ekonomi internasional. Dengan menggunakan kerangka *Hegemonic Stability Theory* (HST), penelitian ini menempatkan FDI tidak hanya sebagai instrumen pembangunan ekonomi, tetapi juga sebagai mekanisme pembentukan pengaruh hegemoni terhadap negara penerima investasi.

Dalam konteks ini, penulis berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menjelaskan bagaimana implementasi FDI Tiongkok membentuk pola pengaruh hegemoni ekonomi terhadap negara penerima melalui pembangunan konektivitas, integrasi produksi, dan keterhubungan ekonomi strategis. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada dimensi pertumbuhan ekonomi dan integrasi investasi, tetapi juga menganalisis bagaimana keterhubungan ekonomi yang terbentuk melalui FDI dapat memperkuat posisi struktural Tiongkok dalam relasi ekonomi internasional. Dengan menggunakan kerangka HST, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi teoritis dalam memahami bagaimana FDI berkembang tidak hanya sebagai instrumen pembangunan ekonomi, tetapi juga sebagai

mekanisme pembentukan pengaruh hegemoni terhadap negara penerima investasi, khususnya dalam kasus Indonesia dan Pakistan.

1.6 Kerangka Pemikiran

Menurut rumusan masalah serta latar belakang penelitian ini, penulis menguraikan hasilnya dengan menggunakan *Hegemonic Stability Theory* (HST) oleh Charles P. Kindleberger dalam buku “*The World in Depression, 1929-1939*”. Teori ini menjelaskan bahwa stabilitas dalam sistem ekonomi internasional sangat dipengaruhi oleh keberadaan negara dengan kapasitas ekonomi dominan yang mampu membentuk serta mempengaruhi pola hubungan ekonomi antarnegara. Dalam kerangka ini, kekuatan ekonomi suatu negara tidak hanya tecermin dari kapasitas produksi dan perdagangan, tetapi juga dari kemampuannya memperluas jaringan ekonomi lintas negara melalui instrumen seperti investasi, perdagangan, serta pembangunan infrastruktur ekonomi (Kindleberger 1973). Melalui instrumen-instrumen tersebut, negara dengan kapasitas ekonomi besar dapat membentuk keterhubungan ekonomi regional sekaligus memperluas pengaruhnya dalam struktur ekonomi internasional.

Kemudian, dalam perkembangan literatur HST yaitu dalam *Dominance and Leadership in the International Economy: Exploitation, Public Goods, and Free Rides* (1981) yang dikembangkan oleh Charles P. Kindleberger, karakter hegemoni ekonomi dianalisis melalui dua dimensi utama, yaitu *leadership* dan *dominance* (Kindleberger 1981). Kedua dimensi ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana negara dengan kapasitas ekonomi besar menggunakan kekuatan ekonominya dalam membentuk struktur ekonomi internasional. Masing-masing

karakter tersebut dapat diidentifikasi melalui tiga indikator utama, yaitu tujuan utama (*primary aim*), metode penggunaan kekuatan ekonomi (*method*), dan implikasi terhadap sistem ekonomi internasional (*outcome*) (Kindleberger 1981).

Karakter *leadership* merujuk pada kondisi ketika negara hegemon menggunakan kapasitas ekonominya untuk menyediakan manfaat kolektif bagi sistem ekonomi internasional. Karakter ini dapat dianalisis melalui beberapa indikator berikut:

1. *Primary Aim (Responsibility & Public Goods)*. Pada indikator ini, negara hegemon berorientasi pada tanggung jawab dalam menyediakan *public goods* bagi sistem ekonomi internasional (Kindleberger 1973). Peran tersebut dapat tecermin melalui penyediaan pembiayaan pembangunan, peningkatan konektivitas perdagangan, serta pembangunan infrastruktur ekonomi yang mendorong integrasi ekonomi kawasan (Kindleberger 1981).
2. *Method (Persuasion & Burden-Sharing)*. Pada indikator ini, negara hegemon mempengaruhi negara lain melalui pendekatan persuasi, kerja sama ekonomi, serta pembagian beban dalam pembangunan ekonomi. Pengaruh ekonomi dibangun melalui partisipasi dan kolaborasi antarnegara dalam berbagai proyek pembangunan dan integrasi ekonomi (Kindleberger 1981).
3. *Outcome (Systemic Stability)*. Hasil dari karakter *leadership* adalah terciptanya stabilitas dalam sistem ekonomi internasional. Yang tecermin dengan peningkatan konektivitas perdagangan, integrasi

ekonomi regional, serta pembangunan infrastruktur lintas negara berkontribusi pada terciptanya sistem ekonomi yang lebih stabil dan terintegrasi (Kindleberger 1981).

Sebaliknya, karakter *dominance* merujuk pada kondisi ketika negara hegemon memanfaatkan kapasitas ekonominya terutama untuk memperkuat kepentingan nasionalnya dalam struktur ekonomi internasional. Karakter ini juga dianalisis melalui tiga indikator berikut:

1. *Primary Aim (Self-Interest & Exploitation)*. Pada indikator ini, orientasi utama negara hegemon adalah memperkuat kepentingan ekonomi nasionalnya. Dalam beberapa kondisi, orientasi tersebut dapat menciptakan ketimpangan dalam hubungan ekonomi dengan negara lain (Kindleberger 1981).
2. *Method (Dictating to Other Nations)*. Pada indikator ini, negara hegemon menggunakan keunggulan kapasitas ekonominya untuk mempengaruhi arah hubungan ekonomi atau kebijakan ekonomi negara lain, sehingga hubungan ekonomi yang terbentuk bersifat lebih asimetris (Kindleberger 1981).
3. *Outcome (Resentment & Resistance)*. Hasil dari karakter *dominance* dapat berupa munculnya resistensi atau ketergantungan ekonomi dari negara lain terhadap sistem ekonomi yang dipengaruhi oleh negara hegemon (Kindleberger 1981).

Kerangka analitis tersebut relevan untuk menjelaskan dinamika FDI Tiongkok di Indonesia dan di Pakistan. Seiring dengan meningkatnya kapasitas ekonomi domestik, Tiongkok secara aktif memperluas keterlibatannya dalam aktivitas ekonomi global melalui peningkatan FDI yang diarahkan pada pembangunan pelabuhan, jaringan transportasi, infrastruktur energi, serta kawasan industri di kedua negara tersebut. Ekspansi investasi ini tidak hanya mencerminkan perluasan aktivitas ekonomi lintas negara, tetapi juga berperan dalam membentuk keterhubungan ekonomi yang semakin erat antara Indonesia dan Pakistan dengan jaringan perdagangan, produksi, dan logistik yang terhubung dengan ekonomi Tiongkok (Hillman 2020).

Melalui pembangunan berbagai proyek infrastruktur dan fasilitas ekonomi tersebut, arus perdagangan, distribusi barang, serta aktivitas produksi di Indonesia dan Pakistan secara bertahap semakin terintegrasi dengan jaringan ekonomi yang dipengaruhi oleh kapasitas ekonomi Tiongkok. Integrasi ekonomi yang terbentuk dari proses tersebut menciptakan pola relasi ekonomi baru antara kedua negara tersebut dengan Tiongkok, yang ditandai oleh meningkatnya keterhubungan dalam arus modal, jaringan produksi, serta sistem perdagangan yang saling terhubung (Hillman 2020). Dalam kerangka ini, dinamika FDI Tiongkok dapat dianalisis untuk memahami bagaimana ekspansi investasi tersebut membentuk konfigurasi hubungan ekonomi yang bersifat struktural dan berkelanjutan antara negara investor dan negara penerima.

Dalam perspektif HST, dinamika tersebut tidak dapat dipahami secara terpisah antara dua karakter hegemoni, melainkan sebagai spektrum yang bersifat

dinamis, dimana *leadership* dan *dominance* dapat muncul secara bersamaan dalam satu spektrum hubungan yang saling berkaitan. Pada satu sisi, karakter *leadership* dapat tecermin ketika ekspansi investasi Tiongkok di Indonesia dan Pakistan berfungsi menyediakan manfaat kolektif, dilakukan melalui mekanisme kerja sama ekonomi, serta berkontribusi pada peningkatan stabilitas dan integrasi ekonomi bilateral maupun regional. Namun pada saat yang sama, karakter *dominance* juga dapat muncul ketika ekspansi investasi tersebut memperkuat posisi struktural Tiongkok dalam jaringan ekonomi kedua negara, menciptakan pola ketergantungan tertentu, atau menghasilkan ketidakseimbangan dalam relasi ekonomi yang terbentuk. Dengan demikian, kedua karakter tersebut tidak berdiri sebagai kategori yang terpisah, melainkan sebagai dimensi yang saling tumpang tindih dalam dinamika hegemoni yang sama (Kindleberger 1981).

Oleh karena itu, analisis terhadap FDI Tiongkok di Indonesia dan Pakistan menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana ekspansi investasi tersebut merefleksikan karakter hegemoni ekonomi Tiongkok dalam struktur ekonomi yang melibatkan kedua negara tersebut.

1.7 Argumen Sementara

Penelitian ini berargumen bahwa FDI Tiongkok di Indonesia dan Pakistan mengalami pergeseran fungsi dari penyediaan *public goods* menuju pembentukan keterikatan struktural yang bersifat asimetris. Pada tahap awal, investasi tersebut berfungsi mengatasi *bottleneck* pembangunan melalui penyediaan infrastruktur, konektivitas, dan kapasitas ekonomi. Namun seiring pendalaman integrasi ekonomi, FDI Tiongkok membentuk hubungan yang semakin terhubung dalam

aspek produksi, pembiayaan, teknologi, dan logistik sehingga memperkuat posisi struktural Tiongkok dalam jaringan ekonomi negara penerima. Meskipun berlangsung melalui sektor dan mekanisme yang berbeda, proses tersebut menghasilkan kecenderungan yang serupa yaitu meningkatnya ketergantungan struktural yang membatasi ruang kebijakan domestik negara penerima.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode ini membantu penulis untuk menghasilkan analisis deskriptif yang bersumber dari berbagai data sekunder, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan, serta informasi relevan yang diperoleh melalui sumber internet.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi FDI Tiongkok melalui kerangka BRI, baik negara investor maupun negara penerima investasi. Adapun objek penelitian ini adalah fungsi FDI Tiongkok dalam membentuk pola pengaruh hegemoni ekonomi melalui integrasi ekonomi, konektivitas strategis, dan keterhubungan struktural dalam hubungan ekonomi antara Tiongkok dengan negara penerima investasi.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data sekunder. Data sekunder adalah jenis-jenis data yang didapatkan melalui artikel, berita, buku, isu-isu sejenis, jurnal, laporan berupa fakta, dan berbagai macam literatur-literatur lain seperti website internet yang

digunakan penulis untuk mempermudah penelitian ini serta untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

1.8.4 Proses Penelitian

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan mengumpulkan berbagai macam data yang berasal dari beberapa referensi kredibel dan terpercaya yang diperoleh sebelumnya. Kemudian penulis akan memaparkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.

1.9 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu:

- a) **BAB I. Pendahuluan.** Berisikan latar belakang, tujuan penelitian, rumusan masalah, tinjauan pustaka, cakupan penelitian, kerangka pemikiran, argumen sementara, dan metode penelitian.
- b) **BAB II. Foreign Direct Investment Tiongkok di Indonesia dan Pakistan Sebagai Instrumen Hegemoni:** Pada bab ini, penulis berupaya menjelaskan pola dan dinamika FDI Tiongkok di Indonesia dan Pakistan, serta menganalisis bagaimana investasi tersebut berfungsi dalam membentuk pola pengaruh hegemoni melalui integrasi ekonomi, pembangunan konektivitas, dan penguatan posisi struktural Tiongkok dalam jaringan ekonomi internasional.
- c) **BAB III. Analisis Fungsi FDI Tiongkok di Indonesia dan Pakistan: Perspektif HST.** Pada bab ini, penulis menganalisis fungsi FDI Tiongkok

dalam membentuk pola pengaruh hegemoni ekonomi terhadap Indonesia dan Pakistan menggunakan perspektif HST.

d) **BAB IV. Penutup.** Pada bab terakhir ini penulis akan memberikan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan juga rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut serta sebagai referensi.

BAB 2

FOREIGN DIRECT INVESTMENT TIONGKOK DI INDONESIA DAN PAKISTAN SEBAGAI INSTRUMEN HEGEMONI

Dalam dinamika ekonomi global kontemporer, investasi lintas negara telah bertransformasi menjadi salah satu instrumen penting bagi negara untuk memperluas pengaruh ekonomi sekaligus memperkuat posisinya dalam sistem ekonomi internasional. Aktivitas FDI tidak lagi dapat dipahami sebagai mekanisme perpindahan modal teknis semata, melainkan sebagai instrumen strategis yang berpotensi membentuk jaringan produksi, integrasi perdagangan, serta keterhubungan ekonomi dalam jangka panjang yang bersifat asimetris antarnegara (Strange 2015).

Dalam perspektif ekonomi politik internasional, investasi internasional memainkan peran krusial dalam menentukan konfigurasi kekuatan ekonomi, dimana penguasaan atas infrastruktur strategis dan rantai pasok global menjadi fondasi bagi pembentukan pengaruh ekonomi suatu negara terhadap negara mitra. Dalam konteks ini, Tiongkok muncul sebagai aktor utama yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam aktivitas investasi luar negeri, seiring dengan pertumbuhan ekonomi domestiknya sejak era reformasi (Brautigam 2020).

Ekspansi ekonomi Tiongkok mengalami pergeseran dari orientasi berbasis perdagangan menuju strategi ekspansi eksternal yang lebih sistematis melalui FDI, khususnya pada pembangunan proyek-proyek infrastruktur strategis di berbagai kawasan. Melalui instrumen ini, Tiongkok tidak hanya berorientasi pada perolehan keuntungan finansial, tetapi juga membangun keterhubungan struktural

yang memungkinkan integrasi ekonomi negara mitra ke dalam jaringan produksi dan logistik yang berpusat pada kapasitas ekonomi Tiongkok (Jones dan Hameiri 2020).

Sebagai kerangka utama dari strategi ekspansi tersebut, pemerintah Tiongkok memperkenalkan BRI pada tahun 2013 sebagai *platform* kerja sama pembangunan infrastruktur dan konektivitas lintas kawasan. Dalam implementasinya, BRI berfungsi sebagai sarana integrasi kebutuhan pembangunan negara mitra, khususnya di sektor energi, transportasi, dan industri ke dalam ekosistem ekonomi Tiongkok (Summers 2016). Proyek-proyek strategis ini kemudian menjadi mekanisme yang tidak hanya membentuk keterhubungan ekonomi, tetapi juga membuka potensi munculnya ketergantungan struktural yang menjadi karakteristik penting dalam dinamika hegemoni ekonomi (Jones dan Hameiri 2020).

Untuk memahami bagaimana FDI Tiongkok mengalami pergeseran menjadi instrumen hegemoni ekonomi, bagian ini terlebih dahulu mengkaji definisi dan konsep FDI dalam perspektif ekonomi-politik. Pembahasan selanjutnya menganalisis kerangka BRI serta pola investasi Tiongkok sebagai fondasi bagi studi kasus di Indonesia dan Pakistan. Penjelasan ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana mekanisme investasi dapat membentuk ketergantungan struktural pada modal, teknologi, dan pembiayaan di negara penerima.

2.1. FDI sebagai Instrumen Ekonomi-Politik

2.1.1 Definisi dan Konsep FDI

FDI merupakan salah satu bentuk investasi internasional yang merujuk pada aktivitas penanaman modal oleh individu, perusahaan, atau institusi dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan memperoleh kepemilikan serta otoritas manajerial yang signifikan terhadap pengelolaan aset ekonomi di negara tujuan (Dunning dan Lundan 2008). Berbeda dengan bentuk investasi finansial lainnya, FDI tidak semata-mata mencerminkan aliran modal lintas negara, tetapi juga merepresentasikan hubungan ekonomi jangka panjang yang bersifat struktural antara investor dan entitas di negara penerima (UNCTAD 2022). Dalam praktik internasional, hubungan investasi langsung umumnya diidentifikasi ketika investor asing memiliki kepemilikan minimal 10% saham atau hak suara, yang dipahami sebagai ambang batas minimal untuk memperoleh kapasitas dalam mempengaruhi keputusan strategis perusahaan (OECD 2008).

FDI memiliki perbedaan mendasar dengan investasi portofolio, terutama dalam hal kapasitas kontrol dan komitmen investasi. Jika investasi portofolio berorientasi pada kepemilikan aset finansial yang likuid tanpa keterlibatan langsung dalam pengelolaan perusahaan, maka FDI melibatkan partisipasi aktif dalam aktivitas operasional serta proses pengambilan keputusan strategis (OECD 2008). Sebagai bentuk investasi jangka panjang, FDI ditandai oleh keterlibatan langsung dalam pengelolaan perusahaan, orientasi terhadap keberlanjutan operasional, serta kecenderungan dijalankan oleh perusahaan multinasional dengan kapasitas finansial, teknologi, dan manajerial lintas negara (Kokko 2003).

Karakteristik ini menunjukkan bahwa FDI tidak hanya berkaitan dengan perpindahan modal, tetapi juga mengandung dimensi kontrol dan otoritas strategis dalam pengelolaan aset ekonomi di negara penerima (Markusen dan Venables 1999). Dalam konteks tersebut, karakter FDI yang lebih strategis tecermin pada kepentingan jangka panjang investor untuk mengamankan keberlanjutan operasionalnya, yang pada akhirnya berpotensi menciptakan keterikatan ekonomi yang relatif sulit dilepaskan secara sepihak (Strange 2015).

Dengan demikian, dalam konteks penelitian ini, FDI tidak hanya dipahami sebagai instrumen ekonomi semata, melainkan sebagai bentuk investasi yang memungkinkan investor memperoleh pengaruh melalui kepemilikan dan keterlibatan langsung dalam aktivitas ekonomi di negara tujuan.

2.1.2 Peran FDI dalam Perekonomian Global

Dalam perekonomian global, FDI tidak hanya dipahami sebagai perpindahan modal lintas negara, tetapi juga sebagai mekanisme yang menghubungkan kegiatan produksi, perdagangan, dan investasi dalam jaringan ekonomi internasional yang semakin terintegrasi (Dunning dan Lundan 2008). Melalui FDI, perusahaan multinasional membangun jaringan produksi lintas negara yang memungkinkan pembagian tahapan proses produksi sesuai dengan keunggulan relatif masing-masing wilayah. Dalam kerangka ekonomi politik internasional, konfigurasi tersebut tecermin dalam *global value chains* (GVC), yaitu struktur produksi global yang mengintegrasikan berbagai aktivitas produksi, pengolahan, dan distribusi di berbagai negara dalam suatu sistem yang saling

terhubung. Dengan demikian, FDI tidak hanya menyediakan sumber pembiayaan, tetapi juga membentuk keterkaitan struktural antara entitas domestik dan jaringan produksi internasional, yang pada akhirnya memperkuat integrasi ekonomi global melalui keterhubungan produksi dan perdagangan lintas negara (Barboza et al. 2025).

Peran strategis FDI juga tecermin dalam kemampuannya mendorong transfer teknologi dan peningkatan produktivitas di negara penerima. Kehadiran perusahaan multinasional membawa teknologi produksi yang lebih maju, praktik manajemen yang lebih efisien, serta standar kualitas yang lebih tinggi, baik melalui adopsi langsung maupun interaksi dengan perusahaan lokal dalam jaringan produksi dan rantai pasok (UNCTAD 2023). Proses ini dapat menghasilkan *spillover effects*, yaitu peningkatan produktivitas perusahaan domestik sebagai akibat dari transfer teknologi, praktik manajerial, serta tekanan kompetitif yang ditimbulkan oleh keberadaan perusahaan asing. *Spillover* tersebut umumnya berlangsung melalui hubungan pemasok (*backward linkages*), dimana perusahaan domestik secara bertahap menyesuaikan standar produksi, kualitas, dan ketepatan distribusi untuk dapat terintegrasi ke dalam jaringan pasok global. Melalui mekanisme ini, FDI tidak hanya berfungsi sebagai sumber modal eksternal, tetapi juga sebagai instrumen yang memperdalam integrasi ekonomi negara penerima ke dalam struktur produksi global yang semakin kompleks (Barboza et al. 2025).

2.1.3 FDI sebagai Mekanisme Pembentuk Pengaruh, Keterhubungan, dan Ketergantungan

Mekanisme pergeseran FDI menjadi instrumen yang dapat membentuk pengaruh ekonomi, memperkuat keterhubungan antarnegara, dan ketergantungan struktural dapat dipahami sebagai proses bertahap yang mengubah aktivitas investasi lintas negara menjadi lebih dari sekadar arus modal. Proses ini tidak berlangsung secara instan, melainkan berkembang secara kumulatif melalui tiga tahap yang saling berkaitan, yaitu keterhubungan ekonomi, integrasi ekonomi, dan ketergantungan struktural, yang kemudian membuka ruang terbentuknya *leverage* bagi pihak investor (Rizki dan Damayanti 2025).

Pada tahap awal, FDI menciptakan keterhubungan ekonomi dengan menghubungkan aktivitas produksi, distribusi, dan pembiayaan antara negara investor dan negara penerima (Hillman 2020). Melalui investasi pada sektor-sektor strategis khususnya infrastruktur dan industri, aktivitas ekonomi domestik mulai terhubung dengan jaringan produksi dan perdagangan global. Dalam proses ini, FDI tidak hanya membawa modal, tetapi juga membawa standar teknis, praktik manajerial, dan model operasional tertentu yang secara perlahan mendorong penyesuaian dalam sistem ekonomi domestik (Nuraini dan Chairullah 2025).

Seiring berjalannya waktu, keterhubungan tersebut berkembang menjadi integrasi ekonomi yang lebih dalam, yaitu ketika aktivitas produksi domestik semakin terhubung dan terstruktur dalam jaringan GVC. Pada tahap ini, sektor-sektor ekonomi di negara penerima tidak lagi beroperasi secara

independen, melainkan menjadi bagian dari sistem produksi global yang saling bergantung. Namun, integrasi ini tidak selalu berlangsung secara simetris, karena aktor yang memiliki keunggulan dalam modal, teknologi, dan pembiayaan cenderung memegang posisi dominan dalam pengaturan struktur dalam jaringan tersebut (Jones dan Hameiri 2021).

Integrasi yang semakin dalam tersebut kemudian mendorong terbentuknya ketergantungan struktural (*structural dependency*), yang ditandai oleh semakin kuatnya keterikatan negara penerima terhadap teknologi, pembiayaan, dan sistem operasional yang dibawa oleh investor. Dalam kondisi ini, muncul *lock-in effect*, yaitu situasi dimana perubahan atau pelepasan dari struktur yang telah terbentuk menjadi sulit dilakukan tanpa menimbulkan risiko biaya ekonomi yang tinggi (CELIOS 2023; Horn et al. 2021). Ketergantungan tersebut secara bertahap membatasi fleksibilitas kebijakan negara penerima, karena keberlanjutan aktivitas ekonomi domestik menjadi semakin bergantung pada stabilitas hubungan dengan investor (Petry 2023).

Dalam kondisi tersebut, ruang kebijakan (*policy space*) negara penerima menjadi semakin terbatas, seiring dengan meningkatnya keterikatan pada jaringan produksi dan pembiayaan yang telah terbentuk. Ketika struktur ekonomi domestik telah terintegrasi secara mendalam dalam sistem tersebut, ketergantungan yang muncul tidak hanya bersifat teknis atau sektoral, tetapi juga bersifat institusional (Nuraini dan Chairullah 2025). Pada titik ini, ketergantungan tersebut secara kumulatif dapat menghasilkan *leverage* bagi investor, yaitu kemampuan untuk

mempengaruhi arah kebijakan dan dinamika ekonomi di negara penerima melalui posisi sentral dalam jaringan ekonomi yang telah terbentuk (Horn et al. 2021).

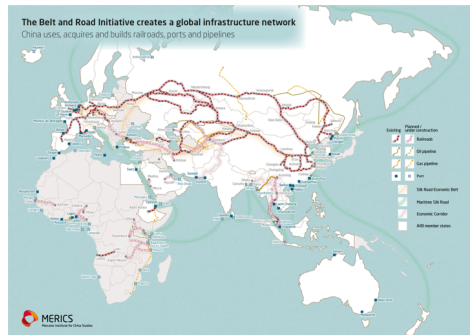
2.2 BRI sebagai Kerangka Ekspansi Ekonomi Tiongkok

2.2.1 Latar Belakang dan Konsep BRI

BRI merupakan salah satu inisiatif pembangunan ekonomi global yang diperkenalkan oleh Tiongkok pada tahun 2013 sebagai kerangka kerja sama lintas kawasan yang berfokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan konektivitas, serta integrasi ekonomi antarnegara. Inisiatif ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Xi Jinping melalui dua pidato di Kazakhstan dan Indonesia yang memperkenalkan konsep *Silk Road Economic Belt* (jalur darat) dan *21st Century Maritime Silk Road* (jalur laut). Kedua konsep tersebut kemudian digabungkan menjadi BRI sebagai strategi pembangunan konektivitas ekonomi yang menghubungkan Asia, Eropa, Afrika, dan kawasan lainnya (Summers 2016).

Secara konseptual, BRI tidak terlepas dari narasi historis Jalur Sutra kuno yang sejak abad ke-2 sebelum masehi berfungsi sebagai jalur perdagangan dan pertukaran antar peradaban. Dengan menghidupkan kembali narasi tersebut, Tiongkok membingkai BRI sebagai kelanjutan dari tradisi konektivitas ekonomi dan kerja sama lintas wilayah. Pendekatan ini memberikan legitimasi normatif terhadap BRI sebagai inisiatif pembangunan yang berorientasi pada konektivitas global dan kerja sama ekonomi (Rolland 2017).

GAMBAR 2.1 Peta BRI Tiongkok



Sumber: MERICS 2020

Di luar dimensi historis, kehadiran BRI juga didorong oleh meningkatnya kebutuhan terhadap konektivitas ekonomi global. Pertumbuhan perdagangan internasional dan kompleksitas jaringan produksi global menuntut pembangunan infrastruktur lintas negara seperti pelabuhan, jalur kereta api, jaringan energi, dan fasilitas logistik. Namun, mayoritas dari negara berkembang menghadapi keterbatasan pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur tersebut, sehingga memunculkan kesenjangan pembiayaan infrastruktur global (*global infrastructure financing gap*) (ADB 2017).

Asian Development Bank (ADB) memperkirakan bahwa negara-negara berkembang di Asia membutuhkan investasi infrastruktur dalam jumlah yang sangat besar setiap tahunnya, yakni sekitar USD 1,5 triliun per tahun hingga tahun 2030, guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, serta mengakomodasi kebutuhan pembangunan yang berkelanjutan. Namun, realisasi pembiayaan yang tersedia masih jauh di bawah tingkat kebutuhan tersebut, dengan investasi aktual yang hanya mampu memenuhi sekitar separuh

dari total kebutuhan yang diestimasi. Kondisi ini menciptakan kesenjangan pembiayaan infrastruktur global (*global infrastructure financing gap*) yang signifikan, dimana defisit pendanaan diperkirakan mencapai ratusan miliar dolar setiap tahunnya antara kebutuhan dan ketersediaan investasi infrastruktur di kawasan Asia berkembang (ADB 2017). Dalam konteks ini, BRI diposisikan sebagai kerangka kerja sama yang bertujuan untuk mengatasi kesenjangan tersebut melalui pembangunan jaringan konektivitas ekonomi lintas kawasan (NDRC 2015; Öztürk 2019; Lin et al. 2025).

Selain faktor eksternal, pembentukan BRI juga berkaitan dengan dinamika domestik Tiongkok, khususnya kebutuhan untuk mengatasi kelebihan kapasitas produksi (*overcapacity*) dalam negeri di sektor industri seperti baja, semen, dan konstruksi (Jones dan Zeng 2019). Dengan memperluas investasi dan proyek infrastruktur ke luar negeri, Tiongkok dapat membuka pasar baru bagi perusahaan nasional sekaligus mempertahankan pertumbuhan industri domestik. Oleh karena itu, BRI tidak hanya berfungsi sebagai inisiatif pembangunan global, tetapi juga sebagai instrumen ekspansi ekonomi eksternal yang menghubungkan kepentingan domestik dan internasional Tiongkok (Hillman 2020).

Dalam implementasinya, BRI terdiri atas dua jalur utama yang saling melengkapi, yaitu *Silk Road Economic Belt* yang berfokus pada konektivitas darat melalui pembangunan koridor ekonomi lintas negara, serta *21st Century Maritime Silk Road* yang menekankan konektivitas maritim melalui pengembangan pelabuhan dan jalur perdagangan laut (Rolland 2017). Kedua jalur ini tidak hanya berfungsi sebagai rute transportasi, tetapi juga sebagai kerangka pembangunan

kawasan ekonomi yang mencakup industri, energi, dan logistik. Melalui pengembangan koridor ekonomi dan infrastruktur strategis tersebut, BRI mendorong terbentuknya jaringan produksi dan perdagangan yang semakin terintegrasi di tingkat regional dan global (Summers 2016).

Dengan demikian, BRI dapat dipahami sebagai kerangka strategis yang mengintegrasikan pembangunan infrastruktur, ekspansi investasi, dan konektivitas ekonomi dalam satu sistem yang saling terhubung. Inisiatif ini tidak hanya berperan dalam meningkatkan efisiensi perdagangan internasional, tetapi juga membentuk jaringan ekonomi lintas kawasan yang menjadi fondasi bagi integrasi ekonomi global yang lebih luas.

2.2.2 Pola dan Sektor Strategis Investasi BRI

Investasi dalam kerangka BRI menunjukkan pola distribusi sektoral yang terstruktur dan sistematis, dengan konsentrasi utama pada sektor infrastruktur, energi, industri, dan konektivitas logistik (Summers 2016). Pola ini mencerminkan pendekatan pembangunan yang terintegrasi, dimana aliran modal tidak hanya diarahkan pada satu sektor tertentu, tetapi didistribusikan secara sistematis untuk membangun ekosistem ekonomi yang sinergis (Huang 2016).

Pada sektor infrastruktur, investasi BRI difokuskan pada pembangunan sektor transportasi seperti pelabuhan, jalur kereta api, dan jaringan jalan yang berfungsi sebagai tulang punggung mobilitas perdagangan dan distribusi logistik. Pembangunan infrastruktur ini tidak hanya meningkatkan efisiensi arus barang dan jasa, tetapi juga membuka akses terhadap wilayah-wilayah yang belum

terintegrasi secara optimal dalam jaringan ekonomi global (Rolland 2017). Sejalan dengan itu, sektor energi juga menjadi salah satu prioritas utama, terutama melalui pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi, serta infrastruktur energi lainnya yang bertujuan untuk mendukung stabilitas pasokan energi bagi aktivitas industri dan pertumbuhan ekonomi (Hillman 2020).

Selain infrastruktur dan energi, BRI juga menempatkan sektor industri sebagai komponen penting dalam strategi investasinya. Hal ini tecermin dari pembangunan kawasan industri, pengolahan sumber daya alam, serta fasilitas manufaktur yang berorientasi pada peningkatan kapasitas produksi dan penciptaan nilai tambah. Investasi pada sektor ini berperan dalam mendorong integrasi aktivitas produksi ke dalam jaringan GVC, sehingga memperkuat keterkaitan antara proses produksi, distribusi, dan perdagangan dalam satu sistem ekonomi yang terintegrasi (Tritto 2023).

Lebih lanjut, keterkaitan antar sektor tersebut menunjukkan bahwa investasi BRI tidak bersifat terpisah, melainkan membentuk pola integrasi vertikal yang menghubungkan infrastruktur, energi, dan industri dalam satu kerangka pembangunan ekonomi. Infrastruktur transportasi berfungsi sebagai penghubung distribusi, sektor energi menjamin keberlanjutan operasional, sementara sektor industri menjadi pusat dalam aktivitas produksi. Kombinasi ini menciptakan jaringan ekonomi yang saling bergantung dan memperkuat konektivitas lintas sektor yang sinergis dalam skala yang lebih luas (Summers 2016).

Dengan demikian, distribusi sektoral investasi BRI mencerminkan strategi pembangunan yang sistematis dan terintegrasi, dimana berbagai sektor kunci

dikembangkan secara simultan untuk membentuk jaringan ekonomi yang mendukung produksi, distribusi, dan perdagangan dalam satu kesatuan struktur yang saling terhubung.

2.3 Studi Kasus Investasi Tiongkok di Indonesia dan Pakistan: Integrasi Produksi dan Konektivitas Ekonomi

Analisis implementasi empiris dalam kerangka dan pola investasi BRI akan disajikan melalui dua studi kasus, yaitu Indonesia dan Pakistan. Kedua kasus ini dipilih untuk merepresentasikan variasi pola investasi dalam BRI, sekaligus menunjukkan bagaimana integrasi sektoral yang telah dibahas sebelumnya diimplementasikan dalam konteks domestik yang berbeda. Indonesia mencerminkan model integrasi produksi berbasis sumber daya yang didorong oleh pembangunan kawasan industri dan infrastruktur pendukung, sementara Pakistan mencerminkan pola investasi yang berfokus pada pembangunan infrastruktur energi dan konektivitas logistik dalam kerangka koridor ekonomi (Kanwal et al. 2020).

Melalui kedua studi kasus ini, terlihat bahwa investasi BRI tidak hanya berfungsi sebagai pembangunan sektor secara terpisah, tetapi sebagai mekanisme yang menghubungkan infrastruktur, energi, dan industri dalam satu sistem ekonomi yang terintegrasi (Jones dan Hameiri 2021). Dengan demikian, pembahasan ini memberikan gambaran empiris bagaimana investasi BRI membentuk keterhubungan ekonomi, memperdalam integrasi, serta menciptakan implikasi struktural dalam ekonomi negara penerima.

2.3.1 Studi Kasus di Indonesia: Integrasi Produksi dan Konektivitas

Investasi Tiongkok di Indonesia menunjukkan pola yang berorientasi pada integrasi produksi berbasis sumber daya alam yang diperkuat oleh pembangunan infrastruktur pendukung. Pola ini tecermin dalam pengembangan industri hilirisasi nikel yang menjadi salah satu sektor strategis dalam kerja sama investasi kedua negara. Melalui arus investasi yang signifikan, Indonesia mengalami pergeseran dari eksportir bahan mentah menuju produsen komoditas olahan dengan tingkat pemrosesan yang lebih tinggi, terutama pada produk antara (*intermediate goods*) seperti *ferronickel* dan *Nickel Pig Iron* (NPI) dalam *global value chains* (GVC) (CELIOS 2023).

Implementasi investasi Tiongkok di Indonesia menunjukkan pola pembentukan ekosistem industri yang terintegrasi secara vertikal, terutama pada sektor pengolahan sumber daya alam (Tritto 2023). Kebijakan hilirisasi nikel menjadi pintu masuk utama bagi masuknya modal dan teknologi yang tidak hanya diarahkan pada pembangunan fasilitas pemurnian (*smelter*), tetapi juga pada penyediaan infrastruktur energi dan logistik yang mendukung keseluruhan proses produksi. Secara operasional, integrasi ini diwujudkan melalui pembentukan entitas bersama (*joint venture*) yang menghubungkan investasi industri dengan dukungan pembiayaan dari bank kebijakan dan lembaga keuangan Tiongkok, sekaligus mengintegrasikan kapasitas teknis dan manajerial dalam satu sistem produksi yang terkoordinasi (Tritto 2023).

Dalam konteks ini, Indonesia Morowali *Industrial Park* (IMIP) berkembang melalui skema *joint venture* yang melibatkan entitas lokal dan

investor Tiongkok, dengan komposisi kepemilikan *Shanghai Decent Investment Group* sebesar 66% dan PT Bintangdelapan Investama sebesar 33% (BKPM 2023). Struktur ini menunjukkan bahwa pembiayaan dan pengembangan kawasan industri berlangsung melalui kombinasi modal asing dan domestik dalam satu entitas usaha. Sementara itu, Indonesia Weda Bay *Industrial Park* (IWIP) juga dibangun melalui skema *joint venture*, namun dengan konfigurasi kepemilikan yang sepenuhnya berada dalam konsorsium perusahaan Tiongkok seperti *Tsingshan*, *Huayou*, dan *Zhenshi Group*, dengan porsi ekuitas *Eternal Tsingshan* 40%, *Huayou Cobalt* 30%, dan *Zhenshi Group* 30% (Responsible Mining Indonesia 2026). Dalam konfigurasi ini, integrasi pembiayaan dan operasional sebagian besar berlangsung dalam jaringan perusahaan investor Tiongkok.

Dalam aspek ekonomi, integrasi ini menghasilkan peningkatan yang signifikan terhadap kapasitas produksi nasional, yang tecermin dari lonjakan produksi NPI dari sekitar 190.000 ton pada 2017 menjadi lebih dari 1,1 juta ton pada 2022 (Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara 2023), serta peningkatan nilai ekspor produk turunan nikel dari USD 3,3 miliar menjadi USD 33,8 miliar dalam periode yang sama (BPS 2023). Perkembangan ini menunjukkan pergeseran struktur ekspor dari bijih mentah menuju produk olahan dengan tingkat pemrosesan lebih lanjut seperti *ferronickel*, NPI, dan *nickel matte*. Peningkatan kapasitas tersebut didukung oleh model integrasi infrastruktur mandiri, termasuk pembangkit listrik (*captive power plants*) dan pelabuhan khusus, yang memungkinkan kesinambungan operasional dari hulu hingga hilir dalam satu sistem yang terkoordinasi (Rosada, Wibisana, dan Paksi 2023).

Namun, di sisi lain, model integrasi ini juga berpotensi menciptakan pola ketergantungan struktural. Dominasi investor Tiongkok dalam aspek teknologi, pembiayaan, dan jaringan distribusi global membentuk keterkaitan operasional yang menempatkan proses produksi domestik dalam jaringan hulu-hilir yang terintegrasi, sehingga nilai ekonomi yang dihasilkan cenderung terakumulasi dalam jaringan produksi tersebut, dengan porsi terbesar dinikmati oleh perusahaan afiliasi Tiongkok yang mengendalikan segmen hilir bernilai tambah tinggi dalam GVC (Wijaya and Jones 2025). Dalam konteks ini, kondisi tersebut berisiko menghasilkan pola *industry enclave*, dimana manfaat ekonomi tidak sepenuhnya terdistribusi secara merata dalam perekonomian domestik di negara penerima. Selain itu, meskipun Indonesia berhasil meningkatkan posisinya dalam GVC melalui pergeseran dari ekspor bijih nikel mentah menuju produksi dan ekspor produk antara (*intermediate goods*) seperti ferronickel, NPI, dan nickel matte, peningkatan tersebut masih terkonsentrasi pada tahapan pengolahan menengah. Hal ini tecermin dari lonjakan kapasitas produksi NPI yang meningkat lebih dari 800%, dari sekitar 190.000 ton pada tahun 2017 menjadi lebih dari 1,1 juta ton pada tahun 2022, serta kenaikan nilai ekspor produk turunan nikel dari USD 3,3 miliar menjadi USD 33,8 miliar pada periode yang sama (Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara 2023; BPS 2023). Transformasi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi hanya berperan sebagai pemasok bahan mentah, melainkan telah memasuki tahapan pengolahan dalam rantai nilai global industri nikel. Namun demikian, sebagian besar aktivitas bernilai tambah tinggi seperti produksi prekursor, sel baterai, pengembangan teknologi, dan manufaktur kendaraan listrik masih terkonsentrasi di Tiongkok. Dengan demikian, hilirisasi

nikel dapat dipahami sebagai proses yang secara simultan mendorong industrialisasi domestik sekaligus memperdalam integrasi Indonesia ke dalam rantai pasok global yang didominasi oleh Tiongkok (Wijaya dan Jones 2025).

Selain pada sektor industri, investasi Tiongkok juga mencakup infrastruktur transportasi strategis seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Secara fungsional, proyek ini diarahkan untuk menghubungkan pusat-pusat ekonomi di koridor Jakarta dan Jawa Barat. Secara struktural, KCJB dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), sebuah entitas *joint venture* dengan komposisi kepemilikan 60% oleh konsorsium BUMN Indonesia melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan 40% oleh *Beijing Yawan HSR Co. Ltd* (Afifah dan Badaruddin 2024).

Dalam aspek pembiayaan, proyek ini pada awalnya menggunakan skema pinjaman dari *China Development Bank* (CDB) dengan model *Business-to-Business* (B2B) tanpa jaminan negara (*sovereign guarantees*). Namun, dalam dinamika implementasi proyek terdapat pembengkakan biaya (*cost overrun*) sebesar USD 1,2 miliar yang menyebabkan peningkatan total nilai proyek secara cukup signifikan dari sekitar USD 6,07 miliar menjadi USD 7,2 miliar (Afifah dan Badaruddin 2024). Perubahan ini mendorong keterlibatan pemerintah melalui pemberian jaminan negara (*sovereign guarantees*) berdasarkan PMK Nomor 89 Tahun 2023, sehingga kewajiban pembiayaan tidak lagi sepenuhnya berada pada level entitas korporasi (Afifah dan Badaruddin 2024).

Transformasi skema tersebut menghasilkan adanya pergeseran dalam distribusi risiko, dari risiko di level korporasi (*corporate risk*) menjadi risiko kedaulatan (*sovereign risk*), dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berfungsi sebagai penjamin akhir atas kewajiban utang proyek kepada CDB. Dalam kondisi ini, struktur pembiayaan proyek tidak hanya menentukan keberlanjutan operasional, tetapi juga membentuk keterkaitan antara kewajiban proyek dan kebijakan fiskal. Keterkaitan ini menjadi penting untuk dicermati lebih lanjut dalam memahami implikasi yang lebih luas terhadap posisi negara dalam hubungan pembiayaan infrastruktur (Nuraini dan Chairullah 2025).

Dengan demikian, studi kasus di Indonesia menunjukkan bahwa investasi Tiongkok berfungsi dalam membangun integrasi produksi melalui hilirisasi industri yang didukung oleh infrastruktur konektivitas. Meskipun menghasilkan peningkatan kapasitas produksi dan nilai ekspor, pola ini juga membentuk keterkaitan struktural dalam aspek teknologi, pembiayaan, dan distribusi nilai tambah, yang mengikat aktivitas produksi domestik ke dalam konfigurasi rantai pasok global yang terkoordinasi oleh jaringan perusahaan Tiongkok.

2.3.2 Studi Kasus di Pakistan: Sektor Energi dan Konektivitas Logistik

Investasi Tiongkok di Pakistan terkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur energi dan konektivitas logistik dalam kerangka *China-Pakistan Economic Corridor* (CPEC), sebagai salah satu koridor utama dalam BRI. Proyek ini memiliki total komitmen investasi lebih dari USD 60 miliar sejak 2015, dengan realisasi fisik sekitar USD 28,5 miliar hingga 2025 (CPEC Authority 2025). Dalam aspek pembiayaan, proyek ini didukung oleh lembaga keuangan

Tiongkok, terutama *China Exim Bank* dan CDB melalui penyediaan kredit jangka panjang untuk proyek-proyek infrastruktur energi dan konektivitas (Horn et al. 2021)

Dalam kerangka implementasinya, proyek-proyek CPEC dijalankan melalui skema *Engineering, Procurement, and Construction* (EPC) serta *turnkey project*, yang menempatkan perusahaan Tiongkok sebagai aktor dominan dalam keseluruhan tahapan pembangunan (Waheed et al. 2025). Skema ini mencakup seluruh tahapan mulai dari desain teknis, pengadaan peralatan, konstruksi, hingga serah terima operasional dalam satu rantai kendali terintegrasi. Dengan demikian, spesifikasi teknis dan standar teknologi telah ditentukan sejak tahap awal, sehingga ruang penyesuaian oleh pihak penerima menjadi terbatas (Horn et al. 2021).

Dalam konteks sektor energi, skema tersebut kemudian diimplementasikan melalui pembangunan berbagai proyek pembangkit listrik yang berkontribusi pada peningkatan kapasitas listrik nasional Pakistan. Sebelum implementasi CPEC, Pakistan mengalami defisit energi listrik sebesar 5.000-7.000 MW per hari dengan durasi pemadaman hingga 12-18 jam (Mehar 2017). Melalui penambahan kapasitas sekitar 11.910 MW termasuk proyek Port Sahiwal dan Port Qasim yang masing-masing berkapasitas 1.320 MW, total kapasitas terpasang nasional Pakistan meningkat menjadi lebih dari 41.000 MW (CPEC Authority 2025).

Selain peningkatan kapasitas listrik nasional, implementasi CPEC juga mencakup pembangunan infrastruktur transmisi untuk mendukung distribusi energi, salah satunya melalui proyek Matiari-Lahore *High Voltage Direct Current*

(HVDC) 4.000 MW (Kanwal et al. 2020). Proyek ini menggunakan standar teknologi transmisi tegangan tinggi yang disediakan oleh konsorsium Tiongkok, termasuk perangkat keras, sistem kontrol, dan komponen teknis yang sejak awal dirancang untuk beroperasi dalam satu sistem yang terintegrasi dan berbasis standar teknis yang sama (Chen 2022). Dalam pelaksanaannya, pembangunan HVDC mengikuti spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak EPC pada tahap inisiasi proyek, sehingga seluruh proses konstruksi dan pengoperasian mengacu pada desain teknis yang telah disepakati sebelumnya (Horn et al. 2021; Nikjow et al. 2021; Waheed et al. 2025).

Seiring dengan peningkatan kapasitas pembangkit listrik tersebut, operasionalisasi infrastruktur energi dalam kerangka CPEC didukung oleh skema *Power Purchase Agreement* (PPA) dengan model *take-or-pay* yang disertai jaminan oleh pemerintah (*sovereign guarantees*), bahwa kewajiban pembayaran dalam kontrak proyek akan tetap dipenuhi oleh negara apabila entitas terkait tidak mampu memenuhinya (Wolf 2020). Dalam skema ini, pemerintah Pakistan menyepakati kontrak pengadaan listrik jangka panjang dengan pihak investor, dimana kewajiban pembayaran tidak sepenuhnya bergantung pada tingkat penyerapan kapasitas oleh pasar, melainkan pada kapasitas tetap yang telah disepakati dalam kontrak (Mehtar 2017). Dengan demikian, meskipun kapasitas listrik yang dihasilkan tidak seluruhnya terserap oleh pasar, pemerintah tetap berkewajiban untuk melakukan pembayaran dalam jumlah tetap (*fixed*) sesuai dengan kapasitas listrik yang dihasilkan dalam proyek pembangkit listrik berdasarkan ketentuan kontraktual yang telah ditetapkan (Akram et al. 2025).

Struktur pembayaran ini kemudian diatur melalui mekanisme penetapan tarif dalam jangka panjang yang mencakup pengembalian investasi kepada pihak investor dengan tingkat *return* sekitar 17-18% (Ali et al. 2025). Dalam kerangka tersebut, risiko permintaan (*demand risk*) tidak ditanggung oleh investor, tetapi dialihkan kepada negara penerima melalui mekanisme kewajiban pembayaran kapasitas yang bersifat tetap, sehingga kontrak PPA ini tidak hanya berfungsi sebagai pengaturan transaksi jual-beli listrik, tetapi juga membentuk struktur jaminan pendapatan jangka panjang bagi investor yang berbasis pada kepastian pembayaran kontraktual, sekaligus menciptakan komitmen fiskal jangka panjang bagi negara penerima dalam pengelolaan pembiayaan infrastruktur energi (Horn et al. 2021).

Selain sektor energi, integrasi antara pembiayaan, operasional, dan kapasitas teknis dalam implementasi proyek CPEC juga membentuk fondasi bagi ekspansi investasi ke sektor konektivitas logistik yang berpusat pada Pelabuhan Gwadar. Konsentrasi investasi pada pembangunan infrastruktur ini berkontribusi terhadap efisiensi sistem logistik yang sebelumnya diperkirakan menimbulkan kerugian ekonomi sebesar 4-6% dari PDB Pakistan (Asian Development Bank 2017). Dalam kerangka perencanaannya, Pelabuhan Gwadar tidak hanya diposisikan sebagai pelabuhan nasional, tetapi juga sebagai simpul transit dalam jaringan perdagangan dan energi yang menghubungkan Asia Selatan, Asia Tengah, dan Timur Tengah. Posisi Pelabuhan Gwadar sebagai simpul transit tersebut berimplikasi pada perubahan pola jalur distribusi perdagangan dan energi, dari rute maritim tradisional melalui Selat Malaka menuju koridor darat-laut yang melewati Pakistan dalam kerangka CPEC (Kardon, Kennedy, dan Dutton 2020).

Peran Pelabuhan Gwadar dalam kerangka CPEC tersebut berimplikasi pada perubahan pola jalur distribusi perdagangan dan energi yang sebelumnya didominasi oleh rute maritim tradisional melalui Selat Malaka dengan jarak sekitar 12.000 kilometer, menjadi rute darat-maritim melalui Pakistan yang memperpendek jarak menjadi sekitar 2.500 kilometer (Wolf 2020). Perubahan ini menghasilkan terbentuknya jalur konektivitas alternatif yang menghubungkan Pelabuhan Gwadar dengan jaringan perdagangan Tiongkok melalui koridor darat-laut, dimana Tiongkok juga terintegrasi dalam konfigurasi jalur distribusi tersebut. Dalam konfigurasi ini, secara geografis jalur tersebut turut memperluas akses perdagangan menuju Samudra Hindia di luar ketergantungan pada rute tradisional melalui Selat Malaka. Penguatan konektivitas tersebut kemudian diikuti dengan pengembangan kapasitas Pelabuhan Gwadar yang diproyeksikan mencapai sekitar 400 juta ton kargo per tahun, sehingga pelabuhan tersebut diposisikan sebagai bagian dari infrastruktur berkapasitas besar yang berfungsi dalam sistem perdagangan lintas wilayah dalam kerangka CPEC (Kanwal et al. 2020; Kardon, Kennedy, dan Dutton 2020).

Secara keseluruhan, studi kasus Indonesia dan Pakistan dalam kerangka BRI menunjukkan pola integrasi dari investasi Tiongkok yang menghubungkan pembangunan infrastruktur, pembiayaan, serta pembentukan jaringan produksi dan distribusi dalam konfigurasi ekonomi yang terbentuk sesuai dengan konteks domestik masing-masing negara. Di Indonesia, integrasi tersebut terutama terlihat dalam pengembangan industri berbasis hilirisasi dan kawasan produksi terintegrasi, sementara di Pakistan terwujud melalui pembangunan infrastruktur

energi dan konektivitas logistik dalam kerangka koridor ekonomi CPEC (Wijaya dan Jones 2025; Wolf 2020).

Perbedaan konteks ini menunjukkan bahwa investasi BRI tidak hanya beroperasi sebagai proyek sektoral, tetapi juga membentuk keterhubungan ekonomi lintas wilayah melalui integrasi pembangunan infrastruktur dan rantai nilai yang saling terkoneksi dalam sistem ekonomi yang lebih luas, berkelanjutan, dan saling bergantung. Dengan demikian, implementasi investasi Tiongkok dalam kedua kasus tersebut memperlihatkan pola integrasi yang melampaui batas sektoral dan memperkuat keterhubungan ekonomi antarwilayah dalam kerangka BRI.

2.4 FDI sebagai Instrumen Pembentuk Ketergantungan Struktural dan Relasi Kekuasaan Asimetris

Berdasarkan temuan empiris sebelumnya, FDI Tiongkok di Indonesia dan Pakistan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembangunan ekonomi semata, tetapi juga bekerja melalui serangkaian mekanisme yang secara sistematis membentuk ketergantungan struktural. Ketergantungan tersebut tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari desain integrasi produksi, skema pembiayaan, serta standardisasi teknis yang dalam proses implementasinya membentuk relasi yang bersifat asimetris antara entitas investor dan negara penerima (Ali et al. 2025). Dalam konteks ini, ketiga mekanisme tersebut saling berkaitan dan membentuk sistem ketergantungan yang terstruktur dalam dimensi produksi, finansial, dan teknologi.

2.4.1 Ketergantungan Struktural melalui Integrasi Vertikal dan Ekosistem Industri

Ketergantungan struktural dalam konteks ini dapat dipahami sebagai hasil dari integrasi vertikal yang menghubungkan rantai nilai dari hulu hingga hilir dalam satu ekosistem industri yang terpusat pada jaringan investor (Tritto 2023). Integrasi tersebut tidak hanya menciptakan efisiensi produksi, tetapi juga membentuk konsentrasi kontrol yang terpusat pada entitas investor atas kepemilikan, teknologi, pembiayaan, serta pengelolaan operasional dalam keseluruhan tahapan industri (Giroud 2024). Dalam konfigurasi ini, aktivitas produksi domestik tidak berkembang secara otonom, melainkan terintegrasi ke dalam sistem industri yang dikoordinasikan melalui jaringan perusahaan investor (Jones dan Hameiri 2021).

Dalam konteks Indonesia, integrasi tersebut tecermin dalam pengembangan kawasan industri nikel IMIP dan IWIP. Di IMIP, *Shanghai Decent* menguasai sekitar 66% kepemilikan saham, sementara di IWIP konsorsium Tiongkok melalui *Tsingshan* dengan porsi 40%, *Huayou* 30%, dan *Zhenshi* 30% secara kolektif menguasai 100% kepemilikan saham (Responsible Mining Indonesia 2026). Dalam praktik investasi internasional, ambang batas minimal kepemilikan sebesar 10% telah dipahami sebagai kapasitas bagi investor untuk mempengaruhi keputusan strategis perusahaan. Dengan demikian, dominasi kepemilikan saham sebesar 66% di IMIP serta kepemilikan sepenuhnya oleh konsorsium Tiongkok dengan kontrol total sebesar 100% di IWIP merepresentasikan tingkat kendali yang sangat dominan pada entitas investor Tiongkok terhadap mayoritas tahapan operasional dan arah pengambilan keputusan strategis dalam ekosistem industri yang terintegrasi tersebut. Dalam kondisi ini, investor tidak hanya berperan sebagai penyedia modal, tetapi juga

berperan dalam menentukan arah strategis atas penggunaan teknologi, alokasi pembiayaan, serta pengelolaan proses produksi secara menyeluruh. Akibatnya, peran entitas domestik cenderung terbatas pada penyediaan sumber daya dan dukungan operasional, sementara kendali utama atas ekosistem industri tetap berada pada jaringan perusahaan investor Tiongkok (Tritto 2023).

Integrasi tersebut kemudian diperkuat melalui pembangunan infrastruktur pendukung yang bersifat mandiri, seperti *captive power plants* dan pelabuhan khusus yang dioperasikan secara langsung dalam kawasan industri (Rosana, Wibisana, dan Paksi 2023). Secara operasional, penggunaan infrastruktur mandiri ini memungkinkan keseluruhan proses produksi, distribusi energi, dan arus logistik berlangsung dalam satu sistem yang terintegrasi dan relatif terpisah dari jaringan publik nasional (Tritto 2023). Kondisi ini menciptakan ekosistem industri yang relatif eksklusif, dimana aktivitas produksi, distribusi, dan sirkulasi nilai ekonomi lebih banyak berlangsung di dalam jaringan perusahaan afiliasi investor. Dalam konteks ini, keterkaitan antara kawasan industri dengan struktur ekonomi domestik menjadi terbatas karena sebagian besar aktivitas produksi, distribusi energi, dan logistik berlangsung di dalam jaringan perusahaan investor itu sendiri. Kondisi tersebut menyebabkan interaksi dengan industri domestik menjadi sangat minim, sehingga *spillover effects* seperti transfer teknologi, penguatan industri pendukung domestik, dan pengembangan rantai pasok nasional tidak berkembang secara optimal (Giroud 2024). Pola ini memperlihatkan karakteristik *industry enclave*, dimana kawasan industri terintegrasi secara kuat ke dalam rantai pasok global, namun memiliki keterkaitan yang terbatas dengan struktur ekonomi domestik (Jones dan Hameiri 2021).

Pola integrasi vertikal tersebut berimplikasi pada peningkatan kapasitas produksi yang signifikan. Produksi NPI meningkat sekitar 800%, dari sekitar 190.000 ton pada 2017 menjadi sekitar 1,1 juta ton pada 2022, sementara nilai ekspor naik dari sekitar USD 3,3 miliar menjadi sekitar USD 33,8 miliar dalam periode yang sama (Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara 2023). Akan tetapi, peningkatan tersebut tidak secara otomatis mencerminkan kemandirian ekonomi domestik. Meskipun Indonesia mengalami peningkatan *output* berupa NPI dan *Mixed Hydroxide Precipitate* (MHP) sebagai produk antara dalam GVC, proses produksi nilai tambah yang lebih tinggi seperti manufaktur bahan baku baterai dan kendaraan listrik tetap terkonsentrasi di industri domestik Tiongkok (Wijaya dan Jones 2025). Dengan demikian, peningkatan kapasitas produksi di Indonesia pada saat yang sama juga memperkuat keterikatan industri domestik pada kebutuhan industri hilir di Tiongkok dalam rantai pasok global nikel, sehingga posisi Indonesia cenderung tetap berada pada tahapan produksi bernilai tambah menengah, sementara proses pengolahan lanjutan dan akumulasi nilai ekonomi yang lebih tinggi tetap terkonsentrasi di Tiongkok (Jones dan Hameiri 2021; CSIS 2024).

Pola keterikatan industri tersebut tidak terlepas dari kebutuhan Tiongkok untuk menjaga keberlanjutan pasokan nikel bagi industri pengolahan dan manufaktur hilirnya. Kebutuhan ini didorong oleh keterbatasan cadangan nikel Tiongkok dibandingkan Indonesia yang memiliki sekitar 62 juta ton cadangan nikel, sementara Tiongkok hanya sekitar 4,4 juta ton (USGS 2025). Ketimpangan sumber daya ini mendorong Tiongkok untuk melakukan integrasi langsung ke dalam sistem produksi domestik Indonesia guna menjamin keberlanjutan pasokan

bagi industri pengolahan nikelnya. Hal ini tecermin dalam tingginya ketergantungan industri Tiongkok terhadap pasokan Indonesia, dimana sekitar 90% impor *ferronickel* (NPI) dan 80-85% MHP berasal dari Indonesia (Mysteel Global 2025). Dalam konteks ini, integrasi vertikal tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan efisiensi produksi, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme yang memungkinkan pengamanan atas akses jangka panjang terhadap pasokan nikel yang dibutuhkan dalam rantai industri Tiongkok (Tritto 2023).

Dengan demikian, integrasi vertikal dalam industri nikel Indonesia tidak hanya menghasilkan peningkatan kapasitas produksi, tetapi juga membentuk keterikatan struktural yang semakin mendalam antara aktivitas industri domestik dan ekosistem produksi investor Tiongkok. Integrasi pembiayaan, teknologi, infrastruktur, dan rantai pasok dalam satu sistem industri yang terkoordinasi tersebut pada akhirnya membentuk *lock-in effect*, dimana pelepasan dari ekosistem industri yang telah terbentuk menjadi semakin sulit karena tingginya ketergantungan terhadap jaringan produksi, teknologi, dan distribusi yang dikendalikan oleh investor eksternal (Camba 2023).

2.4.2 Ketergantungan Finansial melalui Transformasi Risiko dan Keterikatan Fiskal

Seiring dengan integrasi produksi tersebut, ketergantungan juga diperkuat melalui mekanisme finansial yang mentransformasikan risiko korporasi (*corporate risk*) menjadi beban fiskal negara (*sovereign risk*). Dalam konteks ini, skema pembiayaan tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendanaan pembangunan, tetapi juga membentuk keterikatan fiskal dalam jangka panjang

melalui berbagai kewajiban pembayaran kontraktual yang terintegrasi ke dalam struktur kebijakan ekonomi domestik negara penerima (CELIOS 2023). Melalui mekanisme tersebut, risiko bisnis yang pada awalnya berada pada tingkat korporasi secara bertahap bergeser menjadi tanggung jawab fiskal negara ketika proyek mengalami tekanan finansial, keterlambatan pembayaran, atau ketidaksesuaian antara proyeksi pasar dan realisasi permintaan (Horn et al. 2021).

Dalam kasus di Pakistan melalui kerangka CPEC, mekanisme ini tecermin dalam skema PPA dengan model *take-or-pay*. Dalam skema tersebut, pemerintah Pakistan memiliki kewajiban untuk tetap membayar kapasitas listrik yang dihasilkan meskipun tidak seluruhnya terserap oleh pasar domestik, sementara investor memperoleh tingkat pengembalian tetap sekitar 17-18% (Ali et al. 2025). Adanya klausul pembayaran tetap tersebut menyebabkan distribusi risiko atas risiko permintaan (*demand risk*) sepenuhnya dialihkan kepada negara penerima, sehingga pemerintah Pakistan tetap menanggung kewajiban pembayaran terlepas dari tingkat konsumsi listrik domestik. Pada saat yang sama, pembiayaan proyek-proyek energi CPEC juga banyak didukung oleh pinjaman komersial Tiongkok dengan tingkat bunga relatif lebih tinggi dibandingkan pembiayaan dari lembaga multilateral konvensional, yaitu sekitar 4-6% (State Bank of Pakistan 2023). Struktur pembiayaan tersebut meningkatkan tekanan pembayaran utang sekaligus membatasi ruang fiskal negara, karena sebagian besar kapasitas anggaran negara harus dialokasikan untuk memenuhi kewajiban pembayaran yang bersifat kontraktual dan jangka panjang (Kanwal et al. 2020).

Dampak dari struktur pembiayaan tersebut tercermin dalam kondisi ekonomi Pakistan, dimana total utang luar negeri telah melampaui USD 130 miliar pada 2023, sementara beban pembayaran bunga menyerap sekitar 61% pendapatan negara (Ali et al. 2025; Macrotrends 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa kewajiban pembayaran yang terikat dalam kontrak pembiayaan jangka panjang secara bertahap membatasi fleksibilitas fiskal negara dalam menentukan prioritas pembangunan domestik lainnya. Dalam konteks ini, keterbatasan ruang fiskal tidak hanya menghasilkan tekanan pembayaran utang, tetapi juga menghasilkan keterbatasan ruang anggaran bagi sektor publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan sosial akibat akumulasi dari kewajiban pembayaran yang bersifat tetap dan berkelanjutan (Wolf 2020).

Selain itu, ketergantungan finansial juga tercermin melalui transformasi risiko dalam proyek KCJB di Indonesia. Proyek tersebut pada awalnya dijalankan melalui pembentukan entitas *joint venture*, yaitu PT KCIC dengan skema B2B, sehingga risiko pembiayaan secara formal berada pada entitas korporasi (*corporate risk*) tanpa keterlibatan langsung oleh negara melalui APBN (Ravianda 2023). Namun, proyek ini kemudian mengalami *cost overrun* sekitar USD 1,2 miliar yang disertai kenaikan suku bunga pinjaman dari 2% menjadi 3,4%, sehingga menciptakan tekanan finansial yang berdampak pada keberlanjutan pembiayaan proyek (Afifah dan Badaruddin 2024). Kondisi tersebut pada akhirnya mendorong intervensi negara melalui penerbitan PMK No. 89 Tahun 2023 yang memberikan jaminan pemerintah (*sovereign guarantees*) terhadap pembiayaan proyek KCJB. Secara operasional, penerbitan jaminan

tersebut menggeser kewajiban korporasi menjadi kewajiban kontinjensi negara, dimana pemerintah berperan sebagai penjamin akhir apabila terjadi kegagalan pembayaran dalam proyek tersebut (Nuraini dan Chairullah 2025; CELIOS 2023). Dengan demikian, risiko finansial yang semula berada di level korporasi (*corporate risk*) secara bertahap bergeser menjadi tanggung jawab fiskal negara (*sovereign risk*).

Keterkaitan antara kasus Pakistan dan Indonesia terlihat melalui adanya keterlibatan negara melalui distribusi risiko finansial dalam kedua skema, meskipun melalui mekanisme yang berbeda. Dalam kasus Pakistan, risiko telah terinstitusionalisasi sejak tahap awal melalui desain kontraktual seperti skema PPA dengan model *take-or-pay* yang secara langsung mengalihkan risiko permintaan (*demand risk*) kepada negara (Wolf 2020). Sementara itu, dalam kasus Indonesia, pergeseran risiko terjadi secara bertahap melalui proses transformasi yang dipicu oleh *cost overrun* sekaligus kenaikan suku bunga pinjaman, yang kemudian mendorong intervensi negara dalam bentuk pemberian jaminan pemerintah (*sovereign guarantees*) atas kewajiban pembiayaan proyek (Afifah dan Badaruddin 2024). Perbedaan ini menunjukkan bahwa integrasi risiko fiskal negara dapat terjadi baik melalui desain awal kontrak maupun melalui dinamika implementasi proyek. Dalam kondisi ini, kapasitas fiskal negara menjadi semakin terikat pada keberlanjutan proyek dan stabilitas pembayaran utang, sehingga fleksibilitas negara dalam menentukan prioritas kebijakan ekonomi domestik menjadi semakin terbatas (Horn et al. 2021).

Dengan demikian, mekanisme pembiayaan dalam proyek investasi tidak hanya menghasilkan peningkatan akses terhadap pendanaan eksternal, tetapi juga membentuk *lock-in effect* finansial melalui keterikatan kontraktual, keterlibatan jaminan negara, serta kewajiban pembayaran jangka panjang yang relatif tidak fleksibel (Horn et al. 2021). Integrasi finansial tersebut pada akhirnya memperdalam ketergantungan negara penerima terhadap jaringan pembiayaan pihak eksternal, karena pelepasan dari struktur pembiayaan yang telah terbentuk menjadi semakin sulit akibat tingginya konsekuensi fiskal dan keberlanjutan kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi negara (Wolf 2020).

2.4.3 Ketergantungan Teknis melalui Standardisasi Teknologi dan Model Operasional

Selain melalui struktur produksi dan pembiayaan, ketergantungan juga diperkuat melalui dimensi teknis yang bekerja melalui standardisasi teknologi dan model operasional. Dalam proyek-proyek FDI Tiongkok, penggunaan model EPC serta *turnkey project* menempatkan investor sebagai aktor utama dalam keseluruhan tahapan teknis proyek, mulai dari desain, pemilihan spesifikasi teknologi, hingga implementasi dan konfigurasi operasional infrastruktur. Desain teknis pada tahap awal ini bersifat determinatif, karena standar teknis yang ditetapkan sejak tahap awal tersebut menjadi acuan utama dari seluruh sistem yang dibangun (Nikjow et al. 2021).

Konfigurasi tersebut menciptakan *lock-in effect* melalui mekanisme standardisasi teknis, dimana infrastruktur yang dibangun hanya kompatibel

dengan perangkat, suku cadang, dan sistem kontrol yang berasal dari ekosistem teknologi investor (Brautigam 2020; Nikjow et al. 2021). Dengan demikian, desain teknis pada tahap awal menghasilkan standar eksklusif yang secara langsung membatasi kompatibilitas sistem dengan teknologi alternatif. Kondisi ini menghasilkan asimetri teknis akibat keterbatasan akses negara penerima terhadap detail desain sistem, yang kemudian membentuk ketergantungan struktural pada pihak investor dalam pemeliharaan, pembaruan, dan keberlanjutan operasional sistem (Horn et al. 2021).

Dalam konteks Pakistan, mekanisme ini tecermin pada pembangunan Matiari-Lahore HVDC, yang mengadopsi standar transmisi tegangan tinggi berbasis teknologi Tiongkok (Ahmed et al. 2022). Integrasi perangkat keras dan sistem kontrol dalam jaringan HVDC tersebut membentuk sistem yang secara teknis terkunci dalam satu ekosistem teknologi distandardisasi oleh Tiongkok, sehingga membatasi kompatibilitas dengan standar transmisi alternatif. Akibatnya, operasional jaringan listrik tersebut bergantung pada keberlanjutan dukungan teknis dari mitra teknologi asal Tiongkok, termasuk dalam hal pemeliharaan sistem, pembaruan perangkat lunak kontrol, dan ketersediaan suku cadang (Malik et al. 2025).

Selain itu, dalam konteks Pelabuhan Gwadar, skema EPC memberikan kewenangan kepada investor untuk menetapkan spesifikasi teknis infrastruktur sejak tahap inisiasi proyek, termasuk desain pelabuhan, sistem operasional terminal, serta integrasi infrastruktur logistik pendukung. Penetapan standar teknis pada tahap awal ini mengarahkan konfigurasi operasional pelabuhan agar selaras

dengan jaringan logistik milik investor yang lebih luas. Melalui skema EPC, desain teknis infrastruktur ini secara strategis menghasilkan efisiensi dalam rute distribusi energi dan perdagangan dengan merekonfigurasi jalur dari rute maritim konvensional sepanjang 12.000 km melalui Selat Malaka menjadi koridor darat-maritim sejauh 2.500 km yang menghubungkan Tiongkok bagian barat langsung ke Samudra Hindia melalui Pelabuhan Gwadar (Kardon, Kennedy, dan Dutton 2020).

Namun, perubahan ini sekaligus menetapkan standar operasional sejak tahap awal, yang kemudian membentuk keterhubungan operasional berbasis standar tersebut dalam seluruh proses pengelolaan dan distribusi. Dengan kapasitas yang diproyeksikan hingga 400 juta ton kargo per tahun, Pelabuhan Gwadar beroperasi sebagai simpul transit dalam jaringan logistik regional yang terintegrasi, dimana proses operasional, koordinasi logistik, dan pengelolaan arus barang mengikuti standar teknis dan prosedural yang kompatibel dengan ekosistem logistik investor asal Tiongkok (Hillman 2020; Kanwal et al. 2020; Kardon, Kennedy, dan Dutton 2020).

Dengan demikian, desain teknis pelabuhan menunjukkan bahwa infrastruktur tidak bersifat netral, karena sejak tahap awal perencanaan telah membentuk pola integrasi operasional yang menghubungkan fungsi pelabuhan dengan sistem logistik Tiongkok (Kardon, Kennedy, dan Dutton 2020). Dalam konteks ini, ketergantungan yang muncul tidak hanya terbatas pada perangkat keras, melainkan pada standar operasional dan integrasi sistem yang membatasi fleksibilitas pengelolaan alternatif di tingkat domestik.

Sementara itu, dalam kasus Indonesia, ketergantungan teknis tecermin melalui pembangunan infrastruktur pendukung industri nikel termasuk *captive power plants* dan pelabuhan khusus di kawasan industri seperti IMIP dan IWIP (Rosana, Wibisana, dan Paksi 2023). Secara operasional, infrastruktur ini dirancang sebagai sistem operasional tertutup yang terstandardisasi khusus untuk mendukung proses produksi hilirisasi (Tritto 2023). Konfigurasi teknis ini menghasilkan sistem energi dan logistik yang beroperasi dalam bentuk sistem yang tertutup secara operasional, dimana sistem tersebut tidak sepenuhnya terintegrasi dengan jaringan infrastruktur publik nasional, melainkan beroperasi dalam koridor teknis yang terpisah serta disesuaikan dengan kebutuhan ekosistem industri yang dibangun oleh investor (Tritto 2023; Jones dan Hameiri 2021).

Berdasarkan keseluruhan mekanisme tersebut, skema EPC yang berbasis pada standardisasi teknis, integrasi operasional dalam ekosistem teknologi investor, serta sistem infrastruktur tertutup menunjukkan bahwa desain teknis pada tahap awal berimplikasi pada konsekuensi jangka panjang, yaitu *lock-in effect*. Standardisasi teknis yang ditetapkan sejak tahap desain awal ini membatasi fleksibilitas negara penerima karena tingginya biaya transisi menuju teknologi alternatif, baik secara finansial maupun operasional (Horn et al. 2021; Nikjow et al. 2021). Biaya tersebut mencakup kebutuhan mendasar untuk perancangan ulang sistem, penggantian perangkat, hingga restrukturisasi jaringan pendukung. Dengan demikian, mekanisme ini menunjukkan bahwa desain teknis tidak bersifat netral, melainkan cenderung membentuk ketergantungan operasional jangka panjang melalui kombinasi standardisasi teknologi, integrasi sistem, dan

kewajiban pemeliharaan berkelanjutan di dalam ekosistem teknologi investor (Brautigam 2020).

Secara keseluruhan, akumulasi mekanisme integrasi vertikal dalam struktur produksi, transformasi risiko menjadi *sovereign risk* dalam dimensi finansial, serta standardisasi teknologi melalui skema EPC secara kolektif membentuk keterikatan sistemik yang semakin mendalam. Konfigurasi ini menghasilkan *lock-in effect* yang mengintegrasikan ruang kebijakan fiskal negara penerima ke dalam struktur pembiayaan dan operasional investor, sehingga otonomi kebijakan menjadi semakin terbatas akibat skema kontraktual yang tidak fleksibel dan eksklusivitas teknis yang melekat pada sistem (Horn et al. 2021; Nikjow et al. 2021).

Pola ketergantungan yang bersifat struktural, finansial, dan teknis ini menunjukkan bahwa FDI tidak hanya berfungsi sebagai aliran modal, melainkan sebagai instrumen yang membentuk arsitektur keterhubungan ekonomi antarnegara. Berdasarkan pemetaan tersebut, bagian selanjutnya akan menempatkan konfigurasi ini dalam kerangka HST untuk menganalisis bagaimana pola ketergantungan tersebut dapat dibaca dalam spektrum *hegemonic leadership* dan *hegemonic dominance*.

BAB 3

ANALISIS FUNGSI FDI TIONGKOK DI INDONESIA DAN PAKISTAN: PERSPEKTIF HST

Kerangka HST yang dikembangkan oleh Charles P. Kindleberger dalam karyanya yang berjudul “*The World in Depression, 1929-1939*” (1973) serta “*Dominance and Leadership in the International Economy: Exploitation, Public Goods, and Free Rides*” (1981) menyediakan landasan untuk menganalisis dinamika hegemoni sebagai spektrum antara *hegemonic leadership* dan *hegemonic dominance*, dimana stabilitas sistem ekonomi internasional bergantung pada kapasitas aktor hegemon dalam menyediakan *public goods* sekaligus membentuk konfigurasi distribusi manfaat dan kontrol dalam sistem tersebut (Kindleberger 1981). Dalam perspektif ini, karakter hegemoni tidak bersifat statis, melainkan berkembang melalui akumulasi mekanisme ekonomi dan institusional yang secara bertahap dapat menggeser karakter relasi antarnegara dalam sistem ekonomi global.

Berangkat dari temuan dalam bagian sebelumnya, mekanisme integrasi vertikal dalam produksi, risiko yang terinstitusionalisasi menjadi *sovereign risk* dalam struktur finansial, serta standardisasi teknis melalui EPC dan *lock-in effect* menunjukkan bahwa FDI Tiongkok tidak hanya berfungsi sebagai aliran modal, tetapi juga membentuk keterhubungan dan ketergantungan struktural yang bersifat asimetris dalam ekosistem ekonomi negara penerima (Horn et al. 2021; Nikjow et al. 2021). Konfigurasi ini mencerminkan pergeseran fungsi FDI sebagai instrumen yang tidak hanya mendorong aktivitas ekonomi, tetapi juga berperan dalam

memperdalam keterhubungan melalui integrasi produksi, pembiayaan, dan teknologi dalam satu sistem yang terkoordinasi (Wolf 2020).

Dalam konteks Indonesia dan Pakistan, FDI Tiongkok menunjukkan variasi dalam model integrasi, yaitu model integrasi berbasis produksi melalui hilirisasi industri di Indonesia, dan model integrasi berbasis koridor infrastruktur dan energi di Pakistan (Tritto 2023; Mehar 2017). Perbedaan ini mencerminkan fleksibilitas desain investasi tanpa mengubah pola umum pendalaman keterhubungan struktural. Dalam perspektif HST, dinamika ini dapat dipahami sebagai kombinasi antara elemen *hegemonic leadership* dalam bentuk penyediaan infrastruktur ekonomi dan konektivitas, serta elemen *hegemonic dominance* yang tecermin melalui konsolidasi kontrol teknis, dominasi struktur pembiayaan, dan *lock-in* sistem operasional dalam ekosistem teknologi investor (Jones dan Hameiri 2021).

Berdasarkan konteks tersebut, analisis pada bab ini akan menggunakan tiga dimensi utama dalam kerangka HST, yaitu *primary aim*, *method*, dan *outcome* untuk membedah secara kritis bagaimana tujuan, mekanisme implementasi, serta hasil akhir FDI berinteraksi dalam membentuk karakter relasi ekonomi antara Tiongkok dan negara penerima. Dalam kerangka ini, ketiga dimensi tersebut diposisikan sebagai perangkat analitis untuk menganalisis dinamika fungsi FDI, mulai dari orientasi strategis awal, cara kerja operasional, hingga konsekuensi struktural yang dihasilkan dalam sistem ekonomi internasional. Dengan demikian, FDI Tiongkok akan dianalisis tidak hanya sebagai instrumen pembangunan ekonomi, tetapi diposisikan sebagai perangkat yang menjelaskan pergeseran

fungsi FDI melalui proses yang bersifat asimetris, berbasis integrasi lintas sektor, dan dalam banyak kasus, telah terinstitusionalisasi sejak tahap desain awal investasi.

3.1. FDI Tiongkok dalam Spektrum *Hegemonic Leadership*: Penyediaan Kapasitas Ekonomi dan Konektivitas Struktural

3.1.1 Primary Aim:

Dalam kerangka HST yang dikembangkan oleh Charles P. Kindleberger, *primary aim* dari FDI Tiongkok dapat dipahami sebagai tanggung jawab untuk menjalankan fungsi aktor hegemon dalam menyediakan *public goods* yang mampu menjembatani *global infrastructure financing gap* serta menjaga keberlangsungan stabilitas sistem ekonomi internasional (Kindleberger 1981; NDRC 2015). *Global infrastructure financing gap* sendiri merujuk pada kesenjangan antara kebutuhan investasi infrastruktur negara-negara berkembang dan ketersediaan pembiayaan yang ada, yang di kawasan Asia diperkirakan mencapai sekitar USD 1,5 triliun per tahun hingga 2030, dengan defisit pembiayaan yang masih mencapai ratusan miliar dolar setiap tahunnya (ADB 2017). Dalam perspektif ini, penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan kapasitas ekonomi tidak hanya dipahami sebagai ekspansi investasi, melainkan sebagai upaya mengatasi *bottleneck* struktural dalam pembiayaan pembangunan, infrastruktur, energi, dan konektivitas yang menghambat integrasi ekonomi negara-negara penerima ke dalam GVC, sehingga pembangunan kapasitas tersebut dapat berfungsi sebagai fondasi bagi keterhubungan ekonomi yang lebih luas (Wijaya dan Jones 2025; Lin et al. 2025)

Dalam implementasinya, peran penyedia *public goods* tersebut tecermin melalui investasi Tiongkok pada sektor nikel di Indonesia yang difokuskan pada pengembangan industri hilir berbasis sumber daya alam untuk memperkuat integrasi Indonesia ke dalam GVC, khususnya pada rantai pasok industri baterai dan kendaraan listrik. Selain itu, proyek KCJB menunjukkan bagaimana FDI Tiongkok juga diarahkan pada penyediaan infrastruktur untuk memperkuat konektivitas domestik di Indonesia. Sementara di Pakistan, melalui CPEC, investasi difokuskan pada pembangunan sektor energi dan logistik untuk mengatasi *bottleneck* struktural berupa defisit energi listrik dan keterbatasan konektivitas transportasi (Mehar 2017). Pengembangan kapasitas energi dan jaringan logistik dalam kerangka tersebut mencerminkan orientasi investasi yang difokuskan pada penguatan fondasi material bagi aktivitas produksi dan distribusi ekonomi domestik negara penerima (Ali et. al 2025).

Konsistensi pola investasi tersebut menunjukkan bahwa distribusi FDI Tiongkok tidak bersifat acak, melainkan difokuskan pada penyediaan kapasitas infrastruktur, industri, dan konektivitas yang mendukung integrasi ekonomi kawasan. Dalam kerangka HST, pola tersebut dapat dipahami sebagai bentuk penyediaan *public goods* yang memungkinkan sistem ekonomi regional berfungsi secara lebih terhubung dan efisien. Dengan demikian, *primary aim* dari FDI Tiongkok dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk membangun fondasi material bagi keterhubungan ekonomi yang lebih luas melalui penguatan kapasitas industri, energi, dan konektivitas lintas kawasan.

3.1.2 Method

Dalam kerangka HST yang dikembangkan oleh Charles P. Kindleberger, dimensi *method* dalam spektrum *hegemonic leadership* menekankan pada prinsip persuasif dan *burden sharing* sebagai mekanisme utama dalam membangun dan menopang stabilitas sistem ekonomi internasional, dan bukan melalui paksaan politik (*non-interference*) maupun instrumen yang bersifat koersif. Dalam konteks ini, fungsi aktor hegemon dijalankan melalui pendekatan berbasis instrumen ekonomi yang mendorong partisipasi secara sukarela negara penerima melalui kerja sama investasi, distribusi pembiayaan, dan *burden sharing* antar aktor (Kindleberger 1981).

Dengan demikian, metode implementasi FDI Tiongkok dalam spektrum *hegemonic leadership* lebih menekankan penggunaan mekanisme berbasis insentif ekonomi dan kolaborasi korporasi dibandingkan intervensi politik langsung maupun instrumen koersif. Dalam kerangka tersebut, FDI Tiongkok diposisikan sebagai solusi terhadap *global infrastructure financing gap* terutama pada sektor-sektor yang selama ini menghadapi keterbatasan pembiayaan dari institusi maupun investor Barat, sehingga partisipasi negara penerima terbentuk secara sukarela melalui daya tarik ekonomi, kebutuhan pembangunan domestik, mekanisme kerja sama yang berbasis insentif ekonomi, serta kepentingan bersama dalam penguatan fondasi material ekonomi (NDRC 2015; Öztürk 2019; Lin et al. 2025).

Dalam implementasinya, pendekatan tersebut tecermin melalui penggunaan skema *joint venture* yang memungkinkan distribusi pembiayaan dan

risiko pada level korporasi lintas aktor. Pada kasus IMIP, investasi dijalankan melalui pembentukan *joint venture* antara *Shanghai Decent Investment Group* yang berafiliasi dengan *Tsingshan Holding Group* dan PT Bintangdelapan Investama, dimana komposisi kepemilikan sekitar 66% dan 33% menunjukkan adanya pembagian peran, risiko, dan keuntungan dalam pengembangan kawasan industri berbasis integrasi vertikal (Tritto 2023). Dalam kerangka HST, pola tersebut dapat dipahami sebagai bentuk *burden sharing* yang memungkinkan pembangunan kapasitas industri dilakukan melalui kolaborasi investasi antar aktor. Pola serupa juga terlihat pada tahap awal proyek KCJB yang dijalankan melalui pembentukan *joint venture* PT KCIC dengan struktur kepemilikan sekitar 60% oleh konsorsium Indonesia dan 40% oleh konsorsium Tiongkok melalui *Beijing Yawan HSR Co. Ltd.* Pada fase awal implementasinya, pembiayaan proyek dikonstruksi dalam skema B2B tanpa melibatkan *sovereign guarantees*, dimana sekitar 75% pembiayaan berasal dari pinjaman CDB (Afifah dan Badaruddin 2024). Struktur tersebut menunjukkan bahwa distribusi pembiayaan dan risiko pada tahap awal proyek masih berada di level korporasi (*corporate risk*), sehingga keterlibatan fiskal negara penerima dalam pembiayaan proyek pada tahap awal relatif terbatas (Ravianda 2023).

Meskipun demikian, implementasi metode tersebut tidak selalu menghasilkan pola distribusi risiko yang sepenuhnya seragam. Pada kasus IWIP, skema *joint venture* tetap digunakan, namun keseluruhan kepemilikan berada dalam lingkup konsorsium perusahaan Tiongkok, dengan *Eternal Tsingshan* sebesar 40%, *Huayou Cobalt* 30%, dan *Zhenshi Group* 30% (Responsible Mining Indonesia 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme *burden sharing*

dalam IWIP berlangsung secara internal dalam lingkup konsorsium Tiongkok, bukan antara investor dan mitra domestik di negara penerima. Namun demikian, proyek tersebut tetap mencerminkan karakter persuasif, karena partisipasi negara penerima didorong oleh kebutuhan pembangunan domestik serta ketersediaan pembiayaan dan kapasitas industri yang sebelumnya menghadapi keterbatasan dalam pembiayaan dan infrastruktur (Tritto 2023). Pola serupa juga terlihat pada implementasi CPEC, khususnya pada sektor energi yang menggunakan skema kontraktual B2B melalui PPA dengan mekanisme *take-or-pay* dan tingkat pengembalian investasi sekitar 17-18%. Meskipun struktur tersebut relatif tidak fleksibel dibandingkan model *joint venture* di Indonesia, FDI Tiongkok tetap beroperasi melalui instrumen ekonomi yang menawarkan penyediaan kapasitas energi dan pembangunan konektivitas pada sektor-sektor yang sebelumnya menghadapi *bottleneck* struktural dalam energi dan infrastruktur (Ali et al. 2025).

Secara keseluruhan, implementasi FDI Tiongkok dalam kerangka *hegemonic leadership* menunjukkan bahwa pengaruh ekonomi dibangun melalui pendekatan persuasif, daya tarik ekonomi, serta penyediaan kapasitas pembangunan yang mendorong partisipasi sukarela negara penerima. Pola pendekatan ini tecermin melalui instrumen ekonomi persuasif yang berfungsi sebagai pintu masuk bagi integrasi ekonomi yang lebih dalam, terutama melalui pembangunan konektivitas struktural, integrasi vertikal, dan penyediaan *public goods* pada sektor-sektor yang menghadapi *bottleneck* struktural (Öztürk 2019). Namun demikian, variasi dalam struktur kepemilikan, distribusi risiko, dan mekanisme kontraktual menunjukkan bahwa pendekatan tersebut tidak sepenuhnya bersifat seragam, melainkan membentuk spektrum implementasi yang

bergerak dari pola kerja sama berbasis *burden sharing* menuju konfigurasi yang semakin terkonsentrasi (Wang, Si, dan Chen 2024).

Dalam konteks tersebut, terlihat adanya kecenderungan pergeseran fungsi FDI yang berlangsung melalui dua pola utama. Pertama, transformasi secara bertahap dalam distribusi risiko dari level korporasi (*corporate risk*) menuju keterlibatan fiskal negara (*sovereign risk*), sebagaimana terlihat dalam dinamika penyesuaian skema pembiayaan KCJB (Afifah dan Badaruddin 2024). Kedua, melalui konfigurasi relasi yang bersifat asimetris dan telah terinstitusionalisasi sejak tahap desain awal investasi, sebagaimana tecermin pada struktur kepemilikan IWIP maupun mekanisme kontraktual dalam CPEC (Wolf 2020). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa metode *hegemonic leadership* yang pada tahap awal berbasis insentif ekonomi secara bertahap dapat bergeser menjadi mekanisme *lock-in effect* yang membentuk asimetri struktural dalam relasi ekonomi antara Tiongkok dan negara penerima, yang akan dibahas lebih lanjut dalam dimensi *hegemonic dominance*.

3.1.3 Outcome

Dalam kerangka HST, *outcome* dari *hegemonic leadership* direfleksikan melalui penyediaan *public goods* yang mendukung efisiensi dan fungsionalitas sistem ekonomi internasional (Kindleberger 1981). Dalam konteks ini, penyediaan infrastruktur ekonomi seperti energi, transportasi, dan konektivitas logistik dapat dipahami sebagai *public goods* yang berperan dalam meningkatkan efisiensi distribusi, kapasitas produksi, serta memperkuat keterhubungan dalam sistem ekonomi yang lebih luas. Dengan demikian, FDI Tiongkok melalui kerangka BRI

dapat dipahami sebagai instrumen penyediaan fondasi material yang mengatasi *bottleneck* struktural pada sektor infrastruktur di negara penerima, sehingga mendorong peningkatan produktivitas serta aktivitas ekonomi dalam sistem ekonomi domestik (Öztürk 2019).

Dalam konteks Indonesia, manifestasi dari penyediaan fondasi material tersebut terlihat dalam peningkatan kapasitas produksi pada sektor nikel yang mengalami *structural upgrading* dalam GVC. Produksi NPI meningkat signifikan lebih dari 800 persen, dari sekitar 190.000 ton pada 2017 menjadi lebih dari 1,1 juta ton pada 2022 (Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara 2023). Peningkatan kapasitas ini diikuti oleh lonjakan nilai ekspor produk turunan nikel dari sekitar USD 3,3 miliar menjadi USD 33,8 miliar (BPS 2023). Dinamika tersebut menunjukkan peningkatan kapasitas produksi nasional yang signifikan, sehingga memperkuat integrasi Indonesia dalam struktur GVC, meskipun sebagian aktivitas bernilai tambah tinggi masih terkonsentrasi dalam jaringan produksi Tiongkok, khususnya pada sektor manufaktur baterai dan kendaraan listrik (CSIS 2024).

Sementara di Pakistan, manifestasi dari penyediaan fondasi material tersebut juga tecermin dalam peningkatan kapasitas sektor energi dan logistik yang berfungsi sebagai respons terhadap *bottleneck* struktural utama dalam perekonomian domestik. Melalui kerangka CPEC, kapasitas energi meningkat sebesar 11.910 MW, sehingga total kapasitas listrik naik dari sekitar 22.800 MW menjadi lebih dari 41.000 MW (CPEC Authority 2025). Peningkatan kapasitas ini berkontribusi pada pengurangan defisit energi listrik harian yang sebelumnya

mencapai sekitar 5.000-7.000 MW, sehingga meningkatkan stabilitas operasional sektor industri domestik (Mehar 2017). Selain itu, pembangunan Pelabuhan Gwadar dan jaringan transportasi dalam kerangka CPEC meningkatkan efisiensi jalur konektivitas logistik regional dengan memangkas jarak perdagangan utama dari sekitar 12.000 km melalui rute konvensional di Selat Malaka menjadi sekitar 2.500 km melalui daratan Pakistan, sehingga secara signifikan meningkatkan efisiensi logistik regional yang sebelumnya diperkirakan menimbulkan kerugian sebesar 4-6% dari PDB, sekaligus menurunkan biaya transaksi ekonomi (Kanwal et. al 2020; Afzaal 2020; Kardon, Kennedy, dan Dutton 2020).

Seluruh bukti empiris di Indonesia dan Pakistan secara konsisten menunjukkan bahwa *outcome* FDI Tiongkok merefleksikan penyediaan *public goods* yang meningkatkan fungsionalitas dan stabilitas sistem ekonomi internasional melalui penguatan kapasitas produksi dan konektivitas struktural (Öztürk 2019; Li et al. 2022; Tritto 2023). *Outcome* tersebut tidak hanya merepresentasikan ekspansi ekonomi oleh Tiongkok melalui penyediaan infrastruktur, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan efektivitas operasional yang memungkinkan sistem ekonomi domestik negara penerima berfungsi dengan lebih efektif melalui pengurangan *bottleneck* struktural pada sektor energi, industri, dan logistik (Wang, Si, dan Chen 2024). Namun, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, distribusi manfaat dari peningkatan kapasitas tersebut tidak sepenuhnya berlangsung secara simetris, tetapi menunjukkan variasi dalam struktur distribusi nilai tambah dan pembagian risiko antar aktor yang terlibat. Variasi ini menunjukkan bahwa FDI Tiongkok secara fungsional berada dalam

spektrum *hegemonic leadership*, namun mekanisme distribusi manfaat dan risikonya tetap mengandung karakter relasi yang bersifat asimetris.

Dengan demikian, rangkaian temuan pada dimensi *primary aim*, *method*, dan *outcome* menunjukkan bahwa FDI Tiongkok pada tahap ini berfungsi sebagai instrumen *hegemonic leadership* yang berorientasi pada penyediaan kapasitas material dan konektivitas struktural untuk memperkuat fungsionalitas dan stabilitas sistem ekonomi internasional (Kindleberger 1981). Namun, konsistensi pola implementasi tersebut sekaligus mengindikasikan terjadinya pergeseran fungsi FDI, dari sekadar penyediaan kapasitas ekonomi menuju pembentukan relasi ekonomi yang semakin terstruktur dan asimetris, yang akan dianalisis lebih lanjut dalam spektrum *hegemonic dominance* pada bagian berikutnya.

3.2 FDI Tiongkok dalam Spektrum *Hegemonic Dominance*: Mekanisme Kontrol Struktural dan *Lock-in Effect* Ekonomi

Pembahasan pada sub-bab sebelumnya menunjukkan bahwa FDI Tiongkok dalam kerangka BRI berperan dalam memperluas konektivitas ekonomi dan mendorong integrasi produksi melalui pembangunan infrastruktur, kawasan industri, serta jaringan distribusi lintas negara (Li et al. 2022). Namun demikian, integrasi ekonomi tersebut tidak sepenuhnya berlangsung dalam konfigurasi yang simetris. Seiring dengan semakin dalamnya keterhubungan pembiayaan, teknologi, dan produksi antara negara penerima dan jaringan ekonomi Tiongkok, relasi ekonomi yang terbentuk secara bertahap menunjukkan pola keterikatan struktural yang semakin terpusat pada kapasitas investor Tiongkok (Wang, Si, dan Chen 2024).

Dalam konteks ini, karakter *hegemonic dominance* tidak muncul sebagai kondisi yang sepenuhnya terpisah dari *hegemonic leadership*, melainkan berkembang secara dinamis melalui mekanisme integrasi ekonomi yang sejak awal mengandung keterikatan jangka panjang (Kindleberger 1981). Melalui desain pembiayaan, konsentrasi kepemilikan, serta integrasi vertikal industri, FDI Tiongkok tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kapasitas ekonomi, tetapi juga memperkuat posisi struktural Tiongkok dalam jaringan produksi dan distribusi regional (Li et al. 2022). Dengan demikian, pergeseran fungsi FDI sebagai instrumen hegemoni tecermin dari bagaimana integrasi ekonomi tersebut secara bertahap menghasilkan relasi yang semakin asimetris, mempersempit ruang kebijakan ekonomi negara penerima, serta memperkuat ketergantungan terhadap jaringan ekonomi Tiongkok.

3.2.1 *Primary Aim*

Dalam spektrum *hegemonic dominance*, *primary aim* FDI Tiongkok tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai upaya penyediaan *public goods* untuk mendukung stabilitas sistem ekonomi internasional, tetapi berkembang menjadi strategi pengamanan kepentingan nasional melalui penguatan posisi struktural dalam arsitektur ekonomi yang lebih luas (Kindleberger 1981). Dalam konteks ini, infrastruktur yang dibangun melalui FDI Tiongkok tidak hanya berfungsi sebagai instrumen konektivitas dan efisiensi ekonomi, melainkan sebagai mekanisme yang membentuk ulang pola keterhubungan ekonomi melalui penguatan sektor-sektor strategis dalam rantai produksi, energi, dan logistik global (Horn et al. 2021). Pergeseran ini menunjukkan bahwa fungsi FDI Tiongkok tidak lagi

terbatas sebagai instrumen penyediaan *public goods* yang mendukung stabilitas sistem ekonomi semata, tetapi memiliki kecenderungan untuk bergeser menuju mekanisme pembentukan ketergantungan dan pengamanan posisi struktural dalam sistem ekonomi yang lebih luas (Dreher et al. 2022).

Dalam konteks Indonesia, hal tersebut tecermin dalam sektor nikel, dimana Indonesia memiliki cadangan sekitar 62 juta ton, jauh lebih besar dibandingkan cadangan Tiongkok yang hanya sekitar 4,4 juta ton (USGS 2026). Ketimpangan cadangan nikel tersebut menciptakan rasionalitas strategis bagi Tiongkok untuk mengamankan akses jangka panjang terhadap sumber daya strategis Indonesia yang dibutuhkan dalam industri baja, baterai, dan kendaraan listrik domestiknya. Hal ini tecermin dalam struktur impor Tiongkok, dimana sekitar 90% NPI dan 80-85% MHP diimpor dari Indonesia (Mysteel Global 2025). Kondisi tersebut tidak hanya menempatkan Indonesia sebagai mitra produksi, tetapi juga sebagai simpul strategis dalam keberlanjutan industri baja, baterai, dan kendaraan listrik Tiongkok. Dalam konfigurasi ini, FDI Tiongkok pada kawasan industri hilirisasi tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi domestik, tetapi juga mengintegrasikan sumber daya strategis Indonesia ke dalam GVC Tiongkok melalui integrasi vertikal industri. Integrasi tersebut secara bertahap memperdalam ketergantungan industri nikel Indonesia terhadap jaringan produksi, teknologi, pembiayaan, dan pasar Tiongkok (Tritto 2023).

Sementara itu, dalam kasus Pakistan melalui CPEC, infrastruktur konektivitas diposisikan sebagai instrumen untuk merekonfigurasi jalur logistik dan distribusi energi regional. Pengembangan Pelabuhan Gwadar dan jaringan

koridor darat secara sistematis membuka jalur alternatif distribusi energi bagi Tiongkok, dari rute tradisional sekitar 12.000 km melalui Selat Malaka menjadi sekitar 2.500 km melalui daratan Pakistan menuju Xinjiang. Konfigurasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi distribusi energi Tiongkok, tetapi juga berfungsi untuk mengatasi *bottleneck* jalur distribusi akibat *Malacca Dilemma* sekaligus memperkuat akses langsung Tiongkok menuju Samudra Hindia (Kardon, Kennedy, dan Dutton 2020). Dalam konteks ini, FDI Tiongkok dalam kerangka CPEC tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penguatan integrasi ekonomi kawasan melalui pembangunan infrastruktur konektivitas, tetapi juga merekonfigurasi struktur distribusi energi regional dengan mengalihkan jalur logistik utama Tiongkok dari Selat Malaka menuju koridor darat Pakistan. Perubahan ini secara bertahap menempatkan Pakistan sebagai simpul strategis dalam arsitektur distribusi energi Tiongkok, melalui integrasi jaringan pelabuhan, koridor darat, dan infrastruktur energi dalam satu sistem konektivitas yang terintegrasi. Konfigurasi tersebut memperkuat kapasitas Tiongkok dalam menjaga stabilitas distribusi energi domestik dan memperkuat posisi strukturalnya dalam arsitektur ekonomi-politik yang lebih luas (Loke dan Guo 2025).

Dengan demikian, *primary aim* dalam spektrum *hegemonic dominance* menunjukkan bahwa FDI Tiongkok tidak hanya beroperasi sebagai instrumen penyediaan *public goods* yang meningkatkan kapasitas ekonomi negara penerima, tetapi bergeser menjadi mekanisme pengamanan posisi struktural Tiongkok dalam sistem ekonomi yang lebih luas (Kindleberger 1981). Melalui integrasi sumber daya, konektivitas struktural, dan penguatan jalur distribusi strategis, negara penerima secara bertahap diintegrasikan ke dalam jaringan produksi dan logistik

yang tidak hanya mendukung stabilitas sistem ekonomi, tetapi juga memperdalam ketergantungan struktural yang memperkuat posisi struktural Tiongkok (Li et al. 2022). Dalam konfigurasi ini, dominasi tidak beroperasi melalui mekanisme koersif langsung, melainkan melalui keterikatan ekonomi jangka panjang yang secara bertahap mengalami pergeseran menuju relasi yang semakin asimetris dan semakin membatasi ruang kebijakan ekonomi negara penerima (Dreher et al. 2022).

3.2.2 Method

Dalam spektrum *hegemonic dominance*, *method* tidak lagi dapat dipahami sebagai instrumen kerja sama berbasis *burden sharing*, melainkan sebagai mekanisme yang secara aktif mengatur distribusi risiko, kontrol, dan manfaat dalam struktur investasi (Kindleberger 1981). Dalam implementasi FDI Tiongkok, mekanisme ini tidak bekerja secara terpisah dalam dimensi finansial, struktural, dan teknis, melainkan sebagai satu kesatuan arsitektur kontrol yang saling memperkuat dan secara bertahap membentuk relasi ekonomi yang bersifat asimetris (CELIOS 2023). Dalam konfigurasi ini, keterhubungan ekonomi yang awalnya bersifat fungsional secara bertahap bergeser menjadi ketergantungan struktural melalui distribusi risiko, konsolidasi kepemilikan, dan *lock-in* teknologi (Horn et al. 2021; Tritto 2023).

Dalam dimensi finansial, mekanisme kontrol ini beroperasi melalui pergeseran distribusi risiko dari entitas korporasi (*corporate risk*) menuju risiko fiskal negara (*sovereign risk*). Pada proyek KCJB, skema awal berbasis *joint venture* dengan suku bunga sekitar 2% tanpa disertai jaminan negara (*sovereign*

guarantess) menempatkan risiko pembiayaan sepenuhnya pada entitas korporasi, tanpa keterlibatan fiskal negara (Ravianda 2023). Namun, dinamika implementasi berupa *cost overrun* sekitar USD 1,2 miliar yang meningkatkan total biaya proyek menjadi lebih dari USD 7 miliar mengubah konfigurasi risiko secara signifikan. Perubahan ini kemudian diikuti oleh kenaikan suku bunga pinjaman menjadi sekitar 3,4% serta keterlibatan pemerintah Indonesia melalui skema penjaminan fiskal berdasarkan PMK No. 89/2023 (Afifah dan Badaruddin 2024). Dengan demikian, distribusi risiko proyek yang pada tahap awal berada di level korporasi (*corporate risk*) secara bertahap mengalami pergeseran menjadi beban fiskal negara (*sovereign risk*), yang kemudian mempersempit ruang kebijakan ekonomi negara akibat meningkatnya tekanan fiskal (Horn et al. 2021; Hurley, Morris, dan Portelance 2018).

Berbeda dengan KCJB yang memperlihatkan pembentukan ketergantungan secara bertahap melalui dinamika implementasi proyek, proyek energi di Pakistan dalam kerangka CPEC menunjukkan pola yang sejak awal telah diinstitusionalisasikan dalam desain kontraktualnya. Dalam skema PPA berbasis *take-or-pay*, pemerintah Pakistan diwajibkan membayar kapasitas listrik yang dihasilkan meskipun tidak sepenuhnya terserap oleh pasar domestik, sehingga menciptakan keterikatan fiskal jangka panjang melalui pengalihan risiko permintaan (*demand risk*) kepada negara penerima (Wolf 2020; Akram et al. 2025). Mekanisme ini memberikan tingkat pengembalian tetap bagi investor sekitar 17-18%, sementara risiko permintaan (*demand risk*) secara penuh dialihkan kepada negara penerima (Ali et al. 2025). Dalam konteks ini, keterhubungan finansial tidak hanya menghasilkan aliran investasi jangka

panjang, tetapi sekaligus membatasi ruang fiskal negara dalam struktur kewajiban pembayaran yang berkelanjutan. Konsekuensi dari struktur pembiayaan tersebut terlihat dalam tekanan fiskal yang meningkat secara signifikan, yang tercermin dalam kondisi ekonomi Pakistan dimana total utang luar negeri telah melampaui USD 130 miliar pada tahun 2023, dengan beban pembayaran bunga yang menyerap sekitar 61% pendapatan negara (Ali et al. 2025; Macrotrends 2023).

Seiring dengan semakin menguatnya keterikatan finansial tersebut, mekanisme pembentuk ketergantungan berkembang tidak hanya terbatas pada aspek pembiayaan, tetapi juga berlanjut pada konsolidasi struktural dalam sektor industri strategis, dimana kontrol atas produksi dan distribusi nilai semakin terkonsentrasi pada jaringan investor Tiongkok. Di IMIP, struktur kepemilikan saham dalam skema *joint venture* menunjukkan dominasi ekuitas sebesar 66% oleh *Shanghai Decent Investment Group*, sementara mitra domestik hanya memiliki 33% (Tritto 2023). Sementara itu, IWIP kepemilikan saham sepenuhnya dimiliki oleh konsorsium perusahaan Tiongkok dengan distribusi kepemilikan *Eternal Tsingshan* 40%, *Huayou Cobalt* 30%, dan *Zhenshi Group* 30% (Responsible Mining Indonesia 2026). Konsentrasi kepemilikan ini tidak hanya menentukan arah pengambilan keputusan produksi dan teknologi, tetapi juga menentukan bagaimana nilai tambah didistribusikan dalam keseluruhan tahapan produksi (Tritto 2023).

Akumulasi dari ketergantungan finansial dan struktural tersebut dalam berbagai konfigurasi kasus kemudian diperkuat melalui mekanisme teknis yang menggeser keterhubungan ekonomi pada tahap awal menjadi ketergantungan

operasional jangka panjang. Mekanisme ini bekerja melalui model EPC serta skema *turnkey project*, yang menempatkan investor sebagai aktor dominan sejak tahap desain awal hingga operasionalisasi sistem, sehingga standar teknis yang dihasilkan menentukan seluruh tahapan operasional infrastruktur (Rolland 2017; Nikjow et al. 2021). Standardisasi pada tahap awal tersebut menghasilkan arsitektur teknis yang bersifat eksklusif, dimana seluruh komponen sistem dirancang untuk hanya kompatibel secara internal dengan ekosistem teknologi investor (Wang, Si, dan Chen 2024). Akibatnya, perubahan atau substitusi teknologi tidak dapat dilakukan tanpa restrukturisasi menyeluruh terhadap desain, perangkat, dan sistem operasional yang telah terintegrasi. Hal ini meningkatkan biaya transisi teknologi secara signifikan, sehingga menciptakan ketergantungan teknis yang bersifat struktural. Dalam kondisi tersebut, desain teknis yang terkunci dalam ekosistem investor menghasilkan *operational lock-in*, dimana keberlanjutan fungsi infrastruktur ditentukan oleh ketersediaan dukungan teknologi, suku cadang, dan layanan teknis dari pihak investor (Jones dan Hameiri 2021). Dengan demikian, mekanisme teknis tidak hanya memperkuat ketergantungan finansial dan struktural, tetapi juga mengunci ketergantungan tersebut ke dalam keterikatan operasional jangka panjang yang sulit diubah (Horn et al. 2021; Nikjow et al. 2021).

Dengan demikian, dimensi *method* dalam spektrum *hegemonic dominance* bekerja melalui integrasi arsitektur kontrol finansial, struktural, dan teknis. Melalui pergeseran distribusi risiko dari level korporasi (*corporate risk*) menjadi keterlibatan fiskal negara (*sovereign risk*), konsolidasi kepemilikan yang membentuk *industry enclave*, serta *lock-in* teknologi berbasis standardisasi,

mekanisme ini pada akhirnya menggeser keterhubungan ekonomi pada tahap awal menjadi relasi ketergantungan struktural yang merepresentasikan pergeseran fungsi FDI dari instrumen ekonomi menjadi instrumen struktural hegemoni (Horn et al. 2021). Dalam konfigurasi ini, FDI Tiongkok tidak hanya berfungsi sebagai aliran modal, tetapi juga membentuk mekanisme pengaruh struktural yang bekerja melalui desain investasi pada tahap awal dalam membatasi ruang kebijakan negara penerima (Jones dan Hameiri 2021). Oleh karena itu, dominasi tidak berlangsung melalui paksaan langsung, melainkan melalui institusionalisasi ketergantungan di dalam struktur investasi. Konfigurasi ini menghasilkan sistem ekonomi yang bersifat hierarkis, yang akan dianalisis lebih lanjut dalam dimensi *outcome* pada bagian berikutnya.

3.2.3 Outcome

Dalam spektrum *hegemonic dominance*, *outcome* dari FDI Tiongkok tidak lagi merujuk pada peningkatan kapasitas ekonomi atau stabilitas sistemik sebagaimana dalam kerangka *hegemonic leadership*, melainkan pada hasil dari konfigurasi relasi ekonomi yang sejak awal dibentuk oleh desain finansial, struktural, dan teknis yang bersifat asimetris (Kindleberger 1981; Horn et al. 2021). Dengan demikian, stabilitas yang dihasilkan bukan merupakan kondisi yang netral, tetapi merupakan hasil dari distribusi risiko dan manfaat yang tidak simetris antara entitas investor dan negara penerima (Dreher et al. 2022).

Dalam kasus Pakistan, pola tersebut terlihat melalui akumulasi beban fiskal dalam proyek-proyek CPEC. Skema PPA berbasis *take-or-pay* mewajibkan pemerintah Pakistan membayar kapasitas listrik yang dihasilkan meskipun tidak

seluruhnya terserap oleh pasar domestik. Mekanisme ini menciptakan keterikatan fiskal jangka panjang melalui pengalihan risiko permintaan (*demand risk*) kepada negara penerima. Dalam struktur ini, investor memperoleh tingkat pengembalian yang stabil, sementara negara menanggung kewajiban pembayaran yang bersifat tetap dan berulang, sehingga ruang fleksibilitas fiskal menjadi semakin terbatas (Ali et al. 2025). Kondisi tersebut diperkuat oleh struktur utang luar negeri Pakistan yang telah melampaui USD 130 miliar pada tahun 2023, dengan sekitar 61% pendapatan negara dialokasikan untuk pembayaran utang dan bunga (State Bank of Pakistan 2023; Macrotrends 2023). Situasi ini menunjukkan adanya tekanan struktural terhadap kapasitas fiskal negara dalam menjalankan fungsi pembangunan lainnya. Dengan demikian, stabilitas energi yang dihasilkan melalui dalam kerangka CPEC tersebut berjalan secara simultan dengan peningkatan tekanan fiskal dalam jangka panjang, sehingga menciptakan stabilitas yang bersifat kondisional dan bergantung pada keberlanjutan kewajiban pembayaran kepada investor (Akram et al. 2025).

Sementara itu, dalam kasus Indonesia, *outcome* dari investasi Tiongkok menunjukkan pola yang berbeda, yaitu kombinasi antara ekspansi kapasitas industri dan konsentrasi penguasaan nilai tambah. Secara agregat, sektor pengolahan nikel mengalami peningkatan produksi NPI dari sekitar 190.000 ton pada 2017 menjadi lebih dari 1,1 juta ton pada 2022, disertai kenaikan nilai ekspor produk turunan nikel dari USD 3,3 miliar menjadi USD 33,8 miliar (BPS 2023). Data ini menunjukkan adanya integrasi yang lebih dalam ke dalam GVC serta peningkatan kapasitas produksi nasional. Namun, di dalam struktur tersebut, distribusi nilai tambah menunjukkan pola yang tidak simetris. Pada kawasan

industri seperti IMIP dan IWIP, aktivitas dengan nilai tambah tinggi tetap terkonsentrasi pada jaringan produksi yang didominasi oleh aktor Tiongkok (Tritto 2023). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan *output* dan ekspor, sebagian besar manfaat dari proses *industrial upgrading* tidak sepenuhnya terinternalisasi dalam ekonomi domestik. Sebaliknya, posisi Indonesia lebih banyak terkonsolidasi sebagai penyedia bahan baku olahan dalam rantai nilai global, sementara penguasaan teknologi, pembiayaan, dan akses pasar tetap berada dalam kontrol investor Tiongkok (CSIS 2024).

Dalam perspektif HST, kondisi ini menunjukkan bahwa *public goods* yang dihasilkan melalui investasi tidak bersifat netral, melainkan beroperasi dalam struktur hierarkis (Kindleberger 1981). Stabilitas produksi dan peningkatan kapasitas memang tercapai, tetapi manfaatnya terkonsentrasi pada aktor yang menguasai titik-titik strategis dalam rantai nilai global. Secara komparatif, kedua kasus menunjukkan pola yang konsisten bahwa peningkatan kapasitas ekonomi melalui FDI Tiongkok berjalan seiringan dengan distribusi risiko dan manfaat yang tidak simetris antara investor dan negara penerima. Negara memperoleh peningkatan infrastruktur dan kapasitas produksi, tetapi pada saat yang sama menghadapi peningkatan tekanan fiskal, ketergantungan teknologi, dan keterbatasan dalam penguasaan nilai tambah (Li et al. 2022; Tritto 2023).

Dengan demikian, *outcome* dalam dimensi *hegemonic dominance* dapat dipahami sebagai bentuk stabilitas yang bersifat hierarkis, dimana keberlanjutan sistem tidak hanya ditentukan oleh kapasitas investasi, tetapi juga oleh kemampuan mempertahankan struktur ketergantungan yang mengatur distribusi

manfaat secara asimetris. Dalam konteks ini, stabilitas tidak merepresentasikan kondisi kolektif yang setara, melainkan hasil dari penguatan posisi struktural investor Tiongkok dalam jaringan ekonomi global yang terintegrasi secara tidak simetris (Hurley, Morris, dan Portelance 2018; Horn et al. 2021).

3.3 Sintesis: Pergeseran dari *Hegemonic Leadership* menuju *Hegemonic Dominance*

Dalam penelitian ini, pengaruh hegemoni dipahami sebagai kemampuan aktor dominan dalam membentuk struktur ekonomi dan pola keterhubungan negara lain melalui kontrol terhadap pembiayaan, produksi, teknologi, dan distribusi manfaat, sehingga mempengaruhi ruang kebijakan serta orientasi integrasi ekonomi negara penerima (Strange 1988). Dalam konteks tersebut, pengaruh hegemoni tidak selalu muncul melalui kontrol politik secara langsung, tetapi dapat beroperasi melalui integrasi produksi, pembiayaan, teknologi, dan infrastruktur yang secara bertahap membentuk pola ketergantungan struktural dalam hubungan ekonomi antarnegara.

Berdasarkan analisis terhadap FDI Tiongkok di Indonesia dan di Pakistan yang telah diuraikan pada sub bab 3.1 dan 3.2, ditemukan bahwa pola pengaruh hegemoni ekonomi yang terbentuk pada dua studi kasus ini tidak dapat dipahami melalui pemisahan dikotomis sederhana antara *hegemonic leadership* dan *hegemonic dominance*. Sebaliknya, sebagaimana ditegaskan dalam kerangka HST, hegemoni bekerja sebagai spektrum dinamis dimana fungsi penyediaan *public goods* dan pembentukan relasi asimetris tidak hanya berlangsung secara simultan, tetapi juga saling bertransformasi melalui mekanisme struktural, finansial, dan

teknis yang melekat dalam desain investasi itu sendiri (Kindleberger 1981). Dalam konteks ini, FDI Tiongkok tidak hanya beroperasi sebagai instrumen pembangunan, melainkan juga sebagai mekanisme struktural yang secara bertahap membentuk relasi ekonomi asimetris antara Tiongkok dan negara penerima (Dreher et al. 2022).

Pergeseran fungsi FDI Tiongkok tersebut tecermin melalui penyediaan fondasi material untuk mengatasi *bottleneck* struktural pada tahap awal dalam spektrum *hegemonic leadership*, sekaligus berfungsi sebagai instrumen pembentukan keterikatan struktural yang membatasi ruang kebijakan (*policy space*) negara penerima (Öztürk 2019). Variasi empiris dalam kasus Indonesia dan Pakistan menunjukkan dua pola utama, yaitu pola pergeseran melalui dinamika implementasi proyek, serta pola yang telah terinstitusionalisasi sejak desain awal investasi (Afifah dan Badaruddin 2024; Tritto 2023; Ali 2025). Meskipun berbeda dalam jalur pembentukannya, keduanya memperlihatkan pola umum pendalaman keterhubungan struktural yang bersifat asimetris. Dengan demikian, FDI Tiongkok dapat dipahami sebagai instrumen yang merepresentasikan pergeseran fungsi dari penyediaan kapasitas ekonomi menuju pembentukan relasi ekonomi yang semakin hierarkis dan terinstitusionalisasi sejak tahap desain awal investasi.

Untuk memberikan sintesis yang lebih sistematis, Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 berikut merangkum pola pengaruh hegemoni Tiongkok melalui FDI berdasarkan tiga dimensi analitis utama, yaitu *primary aim*, *method*, dan *outcome*.

TABEL 3.1 Aplikasi Kerangka Pemikiran HST pada FDI Tiongkok di Indonesia

Dimensi Analisis		Hegemonic Leadership	Hegemonic Dominance	Hasil Analisis
<i>Primary Aim</i>	D	Penyediaan Fondasi Material Industri dan Infrastruktur (Public Goods)	Pengamanan Sumber Daya Strategis (Self-Interest)	Pola pergeseran tecermin dalam struktur impor Tiongkok, dimana sekitar 90% NPI dan 80-85% MHP diimpor dari Indonesia, yang menjadikan Indonesia sebagai simpul sumber daya strategis bagi industri domestik Tiongkok.
	A	FDI difokuskan pada pengembangan industri nikel di IMIP dan IWIP untuk mengatasi <i>bottleneck</i> pembiayaan dan memperkuat integrasi Indonesia ke dalam GVC, serta pembangunan proyek KCJB yang mendukung konektivitas domestik.	Strategi untuk mengamankan akses jangka panjang terhadap cadangan nikel Indonesia (62 juta ton) guna menjamin keberlanjutan industri baja, baterai, dan kendaraan listrik domestik Tiongkok.	
<i>Method</i>	D	Kolaborasi Insentif dan Skema Joint Venture (Persuasif & Burden Sharing)	Transformasi Risiko, Ketergantungan Teknis dan Struktural (Dictating to Other Nations)	Pola pergeseran tecermin dalam transformasi distribusi risiko akibat <i>cost overrun</i> yang menggeser <i>corporate risk</i> menjadi <i>sovereign risk</i> di proyek KCJB melalui PMK No. 89/2023, dan sistem operasional tertutup dengan penggunaan infrastruktur mandiri (seperti <i>captive power plants</i> dan pelabuhan khusus) yang menciptakan <i>lock-in effect</i> terhadap ekosistem teknologi investor di IMIP dan IWIP. Pola terinstitusionalisasi tecermin dalam dominasi kepemilikan saham oleh entitas Tiongkok di IWIP (100%).
	A	Investasi dijalankan melalui skema <i>joint venture</i> yang terlihat di IMIP dan PT KCIC pada tahap awal dengan distribusi risiko berada pada entitas korporasi (<i>corporate risk</i>) pembentukan <i>joint venture</i> ini mencerminkan implementasi prinsip <i>burden sharing</i> . Selain itu kolaborasi berbasis insentif ekonomi dengan pendekatan non-koersif mencerminkan prinsip persuasif.	Keterlibatan jaminan fiskal negara (<i>sovereign risk</i>) dalam distribusi risiko seiring implementasi proyek KCJB dalam PT KCIC, dominasi kepemilikan saham di IWIP (100%), serta standarisasi teknis dalam keseluruhan tahapan produksi di IWIP dan IMIP.	
<i>Outcome</i>	D	Penguatan Fondasi Material & Kapasitas Produksi (Systemic Stability)	Asimetri Nilai Tambah, Tekanan Fiskal, dan Ketergantungan Struktural (Resentment & Resistance)	Pola pergeseran tecermin dalam penyempitan ruang fiskal negara melalui keterlibatan <i>sovereign guarantees</i> (PMK No. 89/2023), pembentukan <i>industry enclave</i> akibat standarisasi teknis dan operasional sistem tertutup, yang menyebabkan minimnya keterkaitan entitas domestik di IWIP dan IMIP.
	A	Investasi pada sektor energi di IMIP dan IWIP, serta pembangunan konektivitas melalui KCJB, meningkatkan kapasitas produksi, efisiensi mobilitas ekonomi, dan integrasi Indonesia ke dalam GVC, sehingga memperkuat stabilitas fungsional sistem ekonomi domestik maupun keterhubungannya dengan sistem ekonomi yang lebih luas.	Menghasilkan tekanan fiskal negara dengan keterlibatan jaminan pemerintah melalui pergeseran distribusi risiko di proyek KCJB, asimetri ekonomi melalui konsentrasi nilai tambah pada entitas Tiongkok di IWIP dan IMIP, serta ketergantungan struktural pada ekosistem teknologi Tiongkok (<i>lock-in effect</i>) yang menciptakan <i>industry enclave</i> dengan minimnya keterkaitan entitas domestik di IWIP dan IMIP.	

Catatan: D: Deskripsi, A: Analisis.

TABEL 3.2 Aplikasi Kerangka Pemikiran HST pada FDI Tiongkok di Pakistan

Dimensi Analisis		Hegemonic Leadership	Hegemonic Dominance	Hasil Analisis
Primary Aim	D	Mengatasi <i>Bottleneck</i> Struktural (<i>Public Goods</i>)	Rekonfigurasi Jalur Distribusi Tiongkok (<i>Self-Interest</i>)	Pola pergeseran terlihat dari FDI Tiongkok yang awalnya berorientasi pada penguatan kapasitas energi dan konektivitas Pakistan dalam kerangka CPEC, namun kemudian berkembang menjadi instrumen strategis untuk merekonfigurasi jalur logistik melalui Pelabuhan Gwadar guna memperkuat posisi Tiongkok dalam arsitektur perdagangan dan energi kawasan serta mengurangi ketergantungan pada Selat Malaka (<i>Malacca Dilemma</i>).
	A	FDI Tiongkok ditujukan untuk mengatasi <i>bottleneck</i> struktural melalui penyediaan kapasitas listrik sebesar 41.000 MW yang mengatasi defisit listrik di Pakistan (5.000-7.000 MW per hari) dan pembangunan infrastruktur konektivitas Pelabuhan Gwadar dalam kerangka CPEC yang meningkatkan integrasi logistik kawasan.	Pembangunan Pelabuhan Gwadar diposisikan sebagai simpul strategis Tiongkok yang merekonfigurasi jalur logistik menuju Samudra Hindia, dari sekitar 12.000 km melalui jalur konvensional menjadi sekitar 2.500 km melalui koridor CPEC yang terhubung langsung ke Xinjiang, sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada Selat Malaka (<i>Malacca Dilemma</i>).	
Method	D	<i>Bottleneck</i> Infrastruktur dan Partisipasi Sukarela Pakistan (Persuasif)	Instrumen Kontrol melalui Skema Pembentuk Ketergantungan (<i>Dictating to Other Nations</i>)	Pola terinstitusionalisasi terlihat dalam implementasi CPEC yang dijalankan dengan model PPA berbasis <i>take-or-pay</i> yang memusatkan <i>demand risk</i> kepada negara, sehingga prinsip <i>burden sharing</i> tidak terlihat. Diikuti dengan penggunaan skema EPC yang menempatkan investor sebagai aktor dominan sejak tahap desain awal hingga operasionalisasi sistem, yang menghasilkan standarisasi teknis yang menentukan (<i>dictating</i>) seluruh tahapan operasional infrastruktur.
	A	FDI Tiongkok dipandang sebagai solusi terhadap <i>global infrastructure financing gap</i> pada sektor-sektor yang sebelumnya sulit mendapatkan pembiayaan dari institusi Barat, Hal ini mendorong partisipasi sukarela dari Pakistan karena kebutuhan mendesak untuk mengatasi <i>bottleneck</i> energi berupa defisit listrik harian dan infrastruktur konektivitas.	Penggunaan model PPA berbasis <i>take-or-pay</i> dalam proyek CPEC mengalihkan risiko permintaan (<i>demand risk</i>) sepenuhnya kepada negara penerima, sementara entitas Tiongkok menerima tingkat pengembalian investasi yang relatif stabil (17-18%), sehingga prinsip <i>burden sharing</i> tidak terlihat. Selain itu, penggunaan skema EPC serta <i>turnkey project</i> menghasilkan standarisasi teknis dan kontrol investor yang dominan dalam keseluruhan tahapan operasional proyek CPEC.	
Outcome	D	Peningkatan Kapasitas Energi dan Konektivitas (<i>Systemic Stability</i>)	Tekanan Fiskal dan Ketergantungan Teknis (<i>Resentment & Resistance</i>)	Pola pergeseran terlihat dari FDI Tiongkok melalui kerangka CPEC yang tidak hanya mengatasi defisit energi listrik harian yang mendukung stabilitas produksi dan operasional sektor industri Pakistan, tetapi juga membentuk konfigurasi yang menghasilkan tekanan fiskal dan ketergantungan teknis melalui model PPA berbasis skema <i>take-or-pay</i> , serta skema EPC dan <i>turnkey project</i> . Akumulasi tersebut memperkuat <i>lock-in</i> teknis dan berpotensi menghasilkan <i>resistance</i> dan <i>resentment</i> akibat konfigurasi relasi yang semakin asimetris dan
	A	FDI Tiongkok melalui kerangka CPEC berhasil mengatasi defisit energi listrik harian Pakistan (5.000-7.000 MW) dengan penyediaan kapasitas listrik yang secara akumulatif meningkatkan total kapasitas energi Pakistan menjadi lebih dari 41.000 MW. Penambahan kapasitas tersebut berkontribusi terhadap stabilitas pasokan listrik domestik serta mendukung aktivitas produksi dan operasional pada sektor industri yang sebelumnya	Pakistan terikat kontrak dalam model PPA berbasis <i>take-or-pay</i> , sehingga <i>demand risk</i> dialihkan sepenuhnya kepada negara. Kondisi ini menyebabkan peningkatan tekanan fiskal akibat kewajiban pembayaran jangka panjang yang bersifat tetap dan tidak fleksibel, yang tecermin dalam peningkatan utang luar negeri Pakistan (sekitar USD 130 miliar) pada 2023, serta beban pembayaran bunga yang menyerap sekitar 61% dari	

		terhambat oleh adanya defisit energi listrik tersebut. Diikuti dengan pengembangan Pelabuhan Gwadar sebagai infrastruktur konektivitas logistik penunjang yang menjadi <i>bottleneck</i> struktural bagi Pakistan.	anggaran negara yang pada akhirnya mempersempit ruang fiskal negara. Diikuti oleh implementasi skema EPC serta <i>turnkey project</i> yang membatasi pelibatan entitas domestik sekaligus memperkuat ketergantungan dan <i>lock-in</i> teknis pada seluruh tahapan operasional proyek dalam jangka panjang. Akumulasi dari skema dan dinamika pada proyek CPEC dapat menghasilkan resistensi (<i>resistance</i>) dalam bentuk ketidakpuasan (<i>resentment</i>) terhadap konfigurasi relasi yang dianggap semakin asimetris serta mempersempit ruang kebijakan domestik Pakistan.	mempersempit ruang kebijakan domestik Pakistan.
--	--	---	--	--

Catatan: D: Deskripsi, **A:** Analisis.

Secara keseluruhan, Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 menunjukkan bahwa FDI Tiongkok mengalami pergeseran fungsi dari instrumen penyediaan kapasitas material menuju mekanisme pembentukan keterikatan ekonomi yang bersifat asimetris. Pada tahap awal, investasi Tiongkok berfungsi sebagai penyedia *public goods* melalui pembangunan infrastruktur, industrialisasi, dan penyediaan energi untuk mengatasi *bottleneck* pembangunan di negara penerima. Namun dalam proses implementasinya, integrasi tersebut berkembang menjadi mekanisme pembentukan relasi ekonomi asimetris melalui dominasi rantai pasok, ketergantungan teknologi dan pembiayaan, keterlibatan *sovereign guarantees*, serta penguncian struktural (*lock-in*) yang mempersempit ruang kebijakan ekonomi negara penerima (Horn et al. 2021; Öztürk 2019; Tritto 2023; Afifah dan Badaruddin 2024).

Dalam kasus Indonesia, pola tersebut tecermin melalui integrasi vertikal industri nikel berbasis kawasan industri seperti IMIP dan IWIP yang mendorong

terbentuknya *industry enclave* serta dominasi nilai tambah pada jaringan produksi yang terpusat pada Tiongkok (Tritto 2023). Sementara itu, dalam kasus Pakistan, pola *hegemonic dominance* terlihat melalui struktur pembiayaan dan kontrak proyek CPEC, seperti skema EPC dan PPA *take-or-pay*, yang meningkatkan tekanan fiskal dan ketergantungan atas teknologi dan operasional terhadap Tiongkok (Akram et al. 2025; Nikjow et al. 2021). Meskipun kedua kasus menunjukkan jalur pembentukan yang berbeda, keduanya memperlihatkan pola umum bahwa integrasi ekonomi yang dibangun melalui FDI tidak hanya menghasilkan peningkatan kapasitas material, tetapi juga memperkuat posisi Tiongkok sebagai aktor sentral dalam konfigurasi produksi, logistik, dan pembiayaan regional yang lebih luas (Li et al. 2022; Wang, Si, dan Chen 2024; Kardon, Kennedy, dan Dutton 2020).

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis menggunakan kerangka HST, penelitian ini menunjukkan bahwa FDI Tiongkok di Indonesia dan Pakistan mengalami pergeseran fungsi dari instrumen penyediaan manfaat kolektif dalam spektrum *hegemonic leadership* menuju instrumen dominasi struktural dalam spektrum *hegemonic dominance*. Pergeseran tersebut tidak berlangsung secara linear, melainkan berkembang melalui transformasi bertahap dalam dimensi *primary aim*, *method*, dan *outcome* yang melekat pada desain serta implementasi investasi itu sendiri. Pada tahap awal, FDI Tiongkok berfungsi sebagai mekanisme penyediaan *public goods* melalui pembangunan infrastruktur, industrialisasi, konektivitas logistik, dan penyediaan energi yang ditujukan untuk mengatasi bottleneck pembangunan di negara penerima. Dalam konteks Indonesia, fungsi tersebut tecermin melalui pembangunan kawasan industri berbasis hilirisasi nikel seperti IMIP dan IWIP, serta pembangunan infrastruktur strategis seperti KCJB yang diposisikan sebagai katalis percepatan industrialisasi dan modernisasi konektivitas nasional. Sementara itu, dalam konteks Pakistan, fungsi *hegemonic leadership* terlihat melalui proyek-proyek CPEC yang diarahkan untuk mengatasi krisis energi, meningkatkan konektivitas nasional, serta membangun infrastruktur logistik yang selama bertahun-tahun menjadi hambatan utama pertumbuhan ekonomi Pakistan. Pada tahap ini, FDI Tiongkok dipersepsikan sebagai sumber stabilitas ekonomi yang mampu menyediakan kapasitas pembangunan yang sebelumnya sulit dipenuhi oleh negara penerima maupun institusi finansial Barat.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa fungsi pembangunan tersebut secara bertahap mengalami transformasi menuju pembentukan relasi ekonomi yang semakin hierarkis dan terintegrasi secara asimetris ke dalam kepentingan strategis Tiongkok. Pergeseran ini terlihat dari perubahan orientasi investasi yang tidak lagi semata-mata berfokus pada penyediaan kapasitas pembangunan, tetapi juga pada pengamanan rantai pasok, kontrol terhadap jalur logistik strategis, serta penguatan posisi Tiongkok dalam konfigurasi produksi regional dan global. Dalam kasus Indonesia, integrasi vertikal industri nikel memperlihatkan bagaimana hilirisasi yang pada awalnya dipromosikan sebagai instrumen industrialisasi nasional berkembang menjadi struktur produksi yang sangat terpusat pada perusahaan dan teknologi Tiongkok. Dominasi terhadap rantai pasok, standardisasi, penggunaan *captive power plants*, serta jaringan ekspor menyebabkan distribusi nilai tambah tetap terkonsentrasi pada aktor-aktor Tiongkok, sementara posisi Indonesia cenderung terkunci sebagai basis ekstraksi dan pemrosesan awal dalam rantai produksi global. Pola serupa juga terlihat dalam pembangunan infrastruktur strategis yang melibatkan *sovereign guarantees*, skema pembiayaan jangka panjang, serta dominasi kontraktor dan teknologi Tiongkok yang secara tidak langsung mempersempit ruang kebijakan ekonomi negara penerima.

Dalam kasus Pakistan, transformasi tersebut bahkan terlihat lebih terinstitusionalisasi sejak tahap desain awal investasi. Struktur proyek CPEC menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dan energi tidak hanya diarahkan untuk menciptakan stabilitas ekonomi domestik Pakistan, tetapi juga untuk mengamankan kepentingan strategis Tiongkok dalam memperluas jalur

perdagangan dan mengurangi ketergantungan terhadap Selat Malaka. Melalui skema EPC, PPA disertai skema *take-or-pay*, *sovereign guarantees*, serta dominasi perusahaan dan pembiayaan Tiongkok, Pakistan mengalami pendalaman ketergantungan fiskal, teknologi, dan operasional yang memperkuat posisi Tiongkok sebagai aktor sentral dalam pengelolaan infrastruktur strategis negara tersebut. Dalam konteks ini, stabilitas yang dihasilkan tidak sepenuhnya bersifat distributif dan mutualistik, melainkan membentuk konfigurasi hubungan ekonomi yang semakin hierarkis dimana kapasitas pembangunan negara penerima tetap terikat pada keberlanjutan jaringan pembiayaan, teknologi, dan produksi yang dikendalikan oleh Tiongkok.

Lebih jauh, penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh hegemoni dalam konteks FDI kontemporer tidak lagi beroperasi terutama melalui kontrol politik secara langsung, melainkan melalui keterhubungan struktural yang mempengaruhi ruang kebijakan, distribusi manfaat ekonomi, serta orientasi integrasi ekonomi negara penerima. Dengan demikian, hegemoni ekonomi Tiongkok bekerja melalui mekanisme yang lebih kompleks dan institusional, yaitu melalui integrasi produksi, pembiayaan, teknologi, dan infrastruktur yang secara bertahap menciptakan pola *lock-in* dan *dependency* jangka panjang. Dalam konteks tersebut, stabilitas sistemik yang dihasilkan melalui FDI tidak bersifat netral, karena integrasi ekonomi yang terbentuk pada akhirnya mereproduksi distribusi kekuasaan yang asimetris. Negara penerima memang memperoleh peningkatan kapasitas material, pembangunan infrastruktur, serta pertumbuhan aktivitas industri, tetapi dalam saat yang sama juga mengalami penyempitan *policy space*

akibat meningkatnya keterikatan terhadap struktur produksi dan pembiayaan yang berpusat pada Tiongkok.

Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa pola pembentukan *hegemonic dominance* dapat berkembang melalui jalur yang berbeda. Indonesia menunjukkan pola transformasi bertahap yang berkembang seiring dinamika implementasi proyek dan pendalaman integrasi industri, sementara Pakistan menunjukkan pola dominasi yang lebih terinstitusionalisasi sejak tahap awal melalui desain kontraktual dan pembiayaan proyek. Meskipun berbeda dalam mekanisme pembentukannya, kedua kasus memperlihatkan kecenderungan umum bahwa FDI Tiongkok tidak hanya berfungsi sebagai instrumen integrasi ekonomi global, tetapi juga sebagai mekanisme pembentukan stabilitas hierarkis yang mengikat negara penerima ke dalam konfigurasi ekonomi-politik yang semakin terpusat pada Tiongkok. Dalam konteks tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa dinamika *hegemonic leadership* dan *hegemonic dominance* dalam HST tidak dapat dipahami sebagai dua kategori yang sepenuhnya terpisah, melainkan sebagai spektrum yang saling bertransformasi melalui proses integrasi ekonomi yang berlangsung secara simultan. Oleh karena itu, studi ini berargumen bahwa FDI Tiongkok dalam kerangka BRI merepresentasikan bentuk baru hegemoni ekonomi kontemporer yang bekerja melalui arsitektur keterhubungan struktural, dimana pembangunan, integrasi, dan ketergantungan berlangsung secara bersamaan dalam membentuk relasi kekuasaan yang semakin asimetris.

4.2 Rekomendasi

Pada penelitian ini, penulis berfokus pada analisis FDI Tiongkok di Indonesia dan Pakistan dengan menggunakan kerangka HST untuk menjelaskan pergeseran fungsi FDI Tiongkok dari spektrum *hegemonic leadership* menuju *hegemonic dominance* melalui dimensi *primary aim*, *method*, dan *outcome*. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, terutama pada cakupan studi kasus yang hanya mencakup dua negara sehingga belum merepresentasikan variasi yang lebih luas, serta pendekatan yang masih didominasi analisis kualitatif sehingga belum memberikan parameter yang lebih terukur terkait ketergantungan struktural yang terbentuk. Selain itu, analisis juga belum secara mendalam membahas peran aktor domestik dalam merespons mekanisme investasi tersebut. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan studi, mengkombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, serta memperdalam analisis pada dinamika aktor domestik untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai relasi FDI Tiongkok dalam konteks hegemoni global.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Afifah, Nadia Renata Nur, and Muhammad Badaruddin. "Potential Chinese Debt Trap in Infrastructure Development (Case Study of the Jakarta-Bandung High-Speed Railway Project)." *Indonesian Journal of International Relations* 8, no. 1 (2024): 198-222.
- Akram, Muhammad, Fawad Ali, Muhammad Shah, Nafid Khan Muhammad, and Mujeeb Khan. "Debt Diplomacy And Sovereignty: Analyzing China's Belt And Road Initiative In Africa & South Asia." *Policy Journal of Social Science Review* 3, no. 1 (2025): 402-419.
- Ali, Dr Murad. *Sino-Pakistan Partnership Under the China-Pakistan Economic Corridor and the Burden of Expectations*. Palgrave Macmillan, 2025.
- Afzaal, Muhammad. *The China-Pakistan economic corridor of the Belt and Road Initiative concept, context and assessment: by Siegfried O. Wolf, Switzerland, Springer, 2020, 404 pp., £ 88 (hardback), ISBN 978-3-030-16198-9*. Vol. 26, no. 5. Routledge, 2020.
- Ahmed, Adeel, Danish Khan, Ahmed Muddassir Khan, Muhammad Umair Mustafa, Manoj Kumar Panjwani, Muhammad Hanan, Ephraim Bonah Agyekum, Solomon Eghosa Uhunamure, and Joshua Nosa Edokpayi. "Modeling of Efficient Control Strategies for LCC-HVDC Systems: A Case Study of Matiari–Lahore HVDC Power Transmission Line." *Sensors* 22, no. 7 (2022): 2793.
- Brazys, Samuel. "Axel Dreher, Andreas Fuchs, Bradley Parks, Austin Strange and Michael J. Tierney. 2022. Banking on Beijing: The Aims and Impacts of China's Overseas Development Program.(Cambridge: Cambridge University Press)." (2023): 227-231.
- Brautigam, Deborah. "A critical look at Chinese 'debt-trap diplomacy': The rise of a meme." *Area development and policy* 5, no. 1 (2020): 1-14.
- Barboza, Gustavo, Alessandro Braga, Aubin Duchier, Adriana Chacon, Keyssi Calderón, and Gloriana Lang. "Technology transfer, knowledge spillover and foreign direct investment." *The Journal of Technology Transfer* (2025): 1-28.
- Camba, Alvin. *The Political Economy of Indonesia's Nickel Mining Industry*. Strauss Center for International Security and Law, University of Texas, 2023.
- Calabrese, Linda, Rhys Jenkins, and Lorena Lombardozzi. "The Belt and Road Initiative and dynamics of structural transformation." *The European journal of development research* 36 (2024): 515-547.
- Dunning, John H., and Sarianna M. Lundan. *Multinational enterprises and the global economy*. Edward Elgar Publishing, 2008.
- Giroud, Axèle. "World Investment Report 2023: Investing in sustainable energy for all: United Nations Conference on Trade and Development, Geneva and New York, 2023, 205 pp." (2024): 128-131.
- Horn, Sebastian, Carmen M. Reinhart, and Christoph Trebesch. 2021. "China's Overseas Lending." *Journal of International Economics* 133
- Hillman, Jonathan E. *The emperor's new road: China and the project of the century*. Yale. ORIM, 2020.

- Hurley, John, Scott Morris, and Gailyn Portelance. *Examining the debt implications of the Belt and Road Initiative from a policy perspective*. No. 121. Washington, DC: Center for Global Development, 2018.
- Huang, Yiping. "Understanding China's Belt & Road initiative: motivation, framework and assessment." *China economic review* 40 (2016): 314-321.
- Ikenberry, G. John. "The end of liberal international order?." *International affairs* 94, no. 1 (2018): 7-23.
- Jones, Lee, and Shahar Hameiri. *Fractured China*. Cambridge University Press, 2021.
- Jones, Lee, and Shahar Hameiri. "Debunking the myth of 'debt-trap diplomacy'." *Chatham house* 19, no. 2020 (2020): 657-671.
- Jones, Lee, and Jinghan Zeng. "Understanding China's 'Belt and Road Initiative': beyond 'grand strategy' to a state transformation analysis." In *Rising powers and state transformation*, pp. 19-43. Routledge, 2020.
- Kardon, Isaac B., Conor M. Kennedy, and Peter A. Dutton. "China Maritime Report No. 7: Gwadar: China's Potential Strategic Strongpoint in Pakistan." (2020).
- Kokko, Ari. *The economics of foreign direct investment incentives*. No. 3775. CEPR Discussion Papers, 2003.
- Kostecka-Tomaszewska, Luiza, and Monika Krukowska. "China's economic statecraft: The role of the Belt and Road Initiative." (2021).
- Kanwal, Shereen, Abdul Hameed Pitafi, Muhammad Samma, Nadeem Akhtar, dan Mumtaz Ali. "China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) Development Projects and Region-local Connectivity: Issues and Challenges." *Journal of Public Affairs* 20, no. 2 (2020)
- Loke, Beverley, and Xiaoli Guo. "China's coalition-building in the Indo-Pacific: strategies of connectivity and association." *Australian Journal of International Affairs* 79, no. 4 (2025): 552-569.
- Li, Jiatao, Ari Van Assche, Lee Li, and Gongming Qian. "Foreign direct investment along the Belt and Road: A political economy perspective." *Journal of International Business Studies* 53, no. 5 (2022): 902-919.
- Lin, Xinwen, VG R. Chandran Govindaraju, and Angathevar Baskaran. "Impact of the Belt and Road Initiative on China's Inward and Outward FDI and Investment Coordination Synergy." *Sage Open* 15, no. 4 (2025): 21582440251386683.
- Markusen, James R., and Anthony J. Venables. "Foreign direct investment as a catalyst for industrial development." *European economic review* 43, no. 2 (1999): 335-356.
- Mehar, Ayub. 2017. "Economic Benefits of the CPEC: A Business and Growth Outlook." *Policy Paper*, Federation of Pakistan Chambers of Commerce and Industry (FPCCI).
- Nuraini, Elvira, and Emir Chairullah. "Manifestasi Economic Statecraft China dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung." *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora* 10, no. 1 (2025): 64-73.
- National Development and Reform Commission (NDRC), Ministry of Foreign Affairs (MFA), and Ministry of Commerce (MOFCOM) of the People's Republic of China. 2015. *Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st-Century Maritime Silk Road*. Beijing: State

- Council of the People's Republic of China.
- Nikjow, Mohammad Ajmal, Li Liang, Xijing Qi, and Samad Sepasgozar. "Engineering procurement construction in the context of belt and road infrastructure projects in west Asia: a SWOT analysis." *Journal of Risk and Financial Management* 14, no. 3 (2021): 92.
- Öztürk, İbrahim. *The belt and road initiative as a hybrid international public good*. No. 125/2019. Working papers on East Asian Studies, 2019.
- Pangestu, Mari, dan Shiro Armstrong. "Asian Economic Integration: The State of Play." Dalam *Asian Economic Integration in an Era of Global Uncertainty*, disunting oleh Shiro Armstrong dan Tom Westland, 15–62. Canberra: ANU Press, 2018.
- Petry, Johannes. "Beyond ports, roads and railways: Chinese economic statecraft, the Belt and Road Initiative and the politics of financial infrastructures." *European Journal of International Relations* 29, no. 2 (2023): 319-351.
- Ravianda, Yomil, dan Hargo Utomo. *Implementation of Business Strategy under Uncertainty: A Case Study at PT. Kereta Cepat Indonesia China*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2023.
- Rolland, Nadège. "China's Eurasian century." *Political and Strategic Implications of the Belt and Road Initiative* (2017): 32-39.
- Siddiqui, Rizwana, and Krishna Prasad Pant. "Quantifying the Impact of Development of the Transport Sector in Pakistan [with Comments]." *The Pakistan Development Review* (2007): 779-802.
- Strange, Susan. "States and markets." (2015): 1-304.
- Summers, Tim. "China's 'New Silk Roads': sub-national regions and networks of global political economy." *Third World Quarterly* 37, no. 9 (2016): 1628-1643.
- Tritto, Angela. *How Indonesia used Chinese industrial investments to turn nickel into the new gold*. Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, 2022.
- Waheed, Abdul, Sajida Kousar, Muhammad Irfan Khan, and Thomas Bernward Fischer. "Expert perceptions on CPEC sustainability appraisal: SWOT analysis for informed policy decisions." *Environmental Science & Policy* 164 (2025): 104009.
- Wang, Hui, Jeongcheng Si, and Zhihua Chen. "Does the Belt and Road Initiative promote China and the countries along the route to reconstruct the global value chain? Evidence from value-added trade." *Economic Analysis and Policy* 81 (2024): 63-83.
- Wijaya, Trissia, and Lee Jones. "Indonesia, nickel, and the political economy of polyalignment in the Second Cold War." *Third world quarterly* (2025): 1-20.
- Zhou, Jing, and María C. Latorre. "FDI in China and global production networks: Assessing the role of and impact on big world players." *Journal of Policy Modeling* 43, no. 6 (2021): 1225-1240.
- Zikri, Fadhli, and Rizki Damayanti. "Strategi Hegemoni China melalui Belt Road Initiative: Implikasi terhadap Tata Kelola Politik dan Keamanan di Asia." *Journal of Political Issues* 7, no. 1 (2025): 1-16.

Buku

Kindleberger, Charles P. *The world in depression, 1929-1939*. Univ of California

- Press, 1986.
- Kindleberger, Charles P. "Dominance and leadership in the international economy: Exploitation, public goods, and free rides." *International studies quarterly* 25, no. 2 (1981): 242-254.
- Strange, Susan. *States and Markets*. London: Pinter Publishers, 1988.
- Laporan**
- Asian Development Bank (ADB). 2017. *Sector Assessment: Transport*. Manila: Asian Development Bank.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia Ekspor 2022 Jilid II*. Jakarta: BPS, 2023.
- China-Pakistan Economic Corridor Authority. 2025. *Progress of CPEC: Energy Sector and Capacity Building*. Islamabad: Government of Pakistan
- Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. 2023. *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun 2022*. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
- Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM). 2023. *Investment Realization Report 2022*. Jakarta: BKPM.
- State Bank of Pakistan. 2023. *External Debt and Liabilities Statistics*. Karachi: State Bank of Pakistan.
- United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). 2025. *World Investment Report 2025*. Geneva: United Nations
- U.S. Geological Survey (USGS). 2026. *Mineral Commodity Summaries 2026: Nickel*. Reston, VA: U.S. Department of the Interior.

Artikel Daring

- Asian Development Bank. 2017. *Meeting Asia's Infrastructure Needs*. Manila: Asian Development Bank.
- Center for Strategic and International Studies (CSIS). 2024. *Indonesian Industrialization: Downstreaming Up the Value Chain*. Washington, DC: CSIS.
- Center for Economic and Law Studies (CELIOS). 2024. *Debt Trap: China in Indonesia*. Jakarta: CELIOS.
- Global Infrastructure Hub (GI Hub). 2017. *Global Infrastructure Outlook: Methodology*. Sydney: Global Infrastructure Hub.
- Mysteel Global. 2025. "MHP Production and Imports Hit Record Highs in Q1 2025." Mysteel. <https://www.mysteel.net/analysis/5084702-mhp-production-and-imp-ports-hit-record-highs-in-q1-2025>.
- Macrotrends. "Pakistan External Debt Stock (1970–2023)." Accessed May 12, 2026. <https://www.macrotrends.net/global-metrics/countries/pak/pakistan/external-debt-stock>.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). *OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment 2008: Fourth Edition*. Paris: OECD Publishing, 2009.
- Responsible Mining Indonesia. 2026. "Detail Corporate: Indonesia Weda Bay

Industrial Park.” Accessed May 11, 2026.